

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



**TRIWULAN I
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, BBPOM di Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2022 ini.

LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada masa yang akan datang.

Bandung, April 2022

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Sukriadi Darma, S.Si., Apt



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v

Bab 1 Pendahuluan	1.1	LATAR BELAKANG	1
	1.2	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
	1.3	STRUKTUR ORGANISASI	4
	1.4	ISU STRATEGIS	4
Bab 2 Perencanaan Kinerja	2.1	REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020- 2024	15
	2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022	22
	2.3	PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022	24
	2.4	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022	26
	2.5	METODE PENGUKURAN	28
Bab 3 Perencanaan Kinerja	3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
	3.2	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	125
Bab 4 Perencanaan Kinerja	4.1	KESIMPULAN	135
	4.2	SARAN	137
LAMPIRAN			138



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2022 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama triwulan I tahun 2022. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2022 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama triwulan IV tahun 2021 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2022 yang telah ditetapkan tanggal 16 Desember 2021. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 yang telah dilakukan reviu dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun Bandung Tahun 2020-2024.

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan, Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan indikator) indikator sasaran kegiatan. Dengan hasil sebagai berikut: dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria baik, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria cukup, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta empat (4) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun.

Pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (TE=4,74). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada triwulan I terlaksana secara efisien (TE=0.64).

Sedangkan anggaran Balai Besar POM di Bandung tahun 2022 sebesar Rp. 57.361.818.000,-. dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.257.850.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.595.745.000,-. Pada triwulan I tahun 2022, realisasi anggaran sebesar Rp. 13.237.511.413,- (23.08%).

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Bandung untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, April 2022

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Sukriadi Darma, S.Si., Apt



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



TRIWULAN I
TAHUN 2022



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan IV Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan IV Tahun 2021 dan tahun kedua dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien



guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 13 (tiga belas); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 39 (tiga puluh sembilan).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu

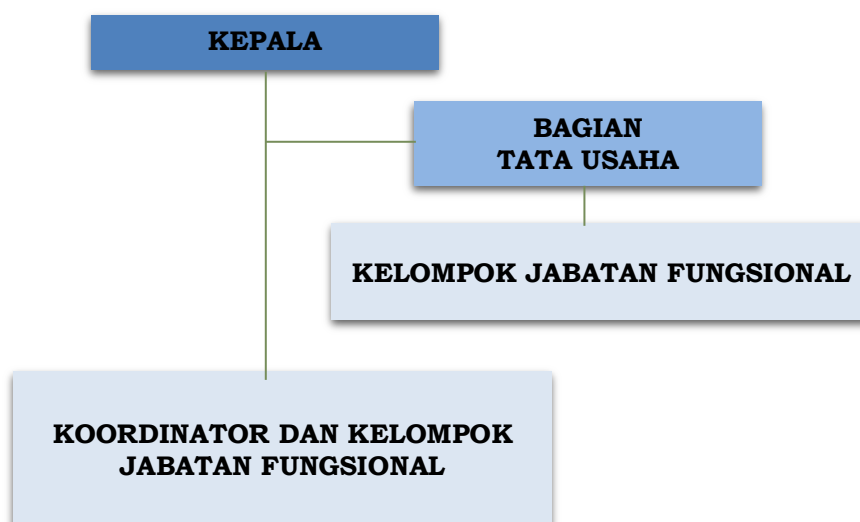


UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
		19. Kabupaten Kuningan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 7 September 2020.

**GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG**



1.4 ISU STRATEGIS

Sering dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2021 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan



Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar



POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2019, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu melalui :

- a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
- b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang



peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

Implementasi JKN dalam menghadapi Pandemi covid-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatnya kapasitas produksi industry farmasi maupun obat tradisional yang menghasilkan Vitamin, Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, juga industri kosmetik yang menggunakan fasilitas produksinya bersamaan dengan produksi hand



sanitizer menyebabkan dampak langsung pada Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM. Sementara dampak tidak langsungnya ke masyarakat membuat Balai Besar POM di Bandung harus lebih giat dalam memberikan KIE mengenai cara konsumsi vitamin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang benar; karena pastinya konsumsi produk ini akibat pandemi meningkat cukup signifikan.

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 terdapat 88 industri farmasi, 54 industri Obat Tradisional, 24.291 industri PKRT, 187 industri kosmetik, 1802 industri suplemen makanan, 104 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 141 industri alat kesehatan dan 926 Industri Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Pandemi covid-19 yang kemudian mendatangkan vaksin dari Tiongkok juga merupakan bukti bahwa Badan POM terlibat dalam komitmen internasional, yang akhirnya menantang UPT-nya termasuk Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM-nya terutama dalam hal pengawalan distribusi vaksin dan pengujian sampel swab antigen dan RT-PCR.

Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular



lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.



Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offline maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.



Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019)



menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)*, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System (ICJS)*, dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF)*, *World Health Organization (WHO)*, *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories (AFL)*, *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)*, dan *International Crime Police Organization Interpol*.

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi



melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersamaan tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pandemik Covid-19

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat, Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.




LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



TRIWULAN I
TAHUN 2022

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- 
- 2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**
 - 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022**
 - 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022**
 - 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022**
 - 2.5 METODE PENGUKURAN**

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Berdasarkan hasil reviu ***Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024***, karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM. Visi, Misi dan Tujuan BPOM masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

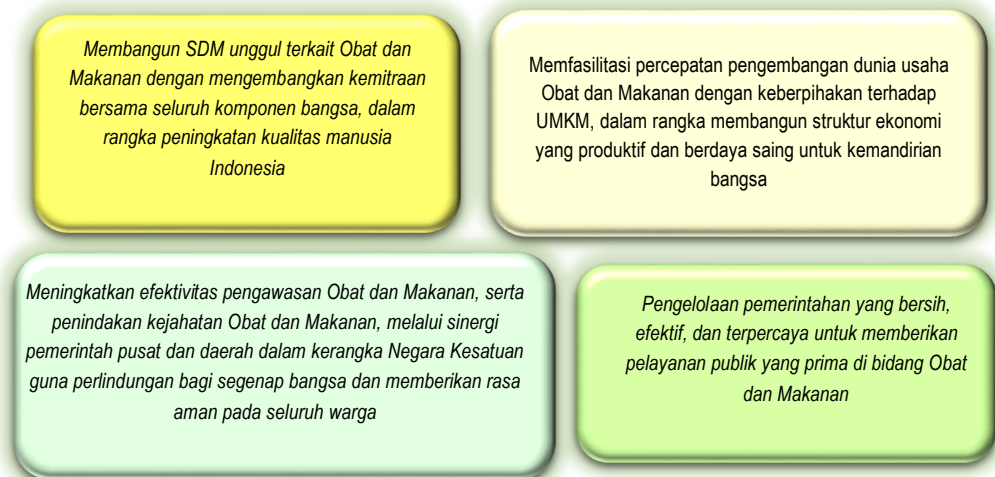


MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan i

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:

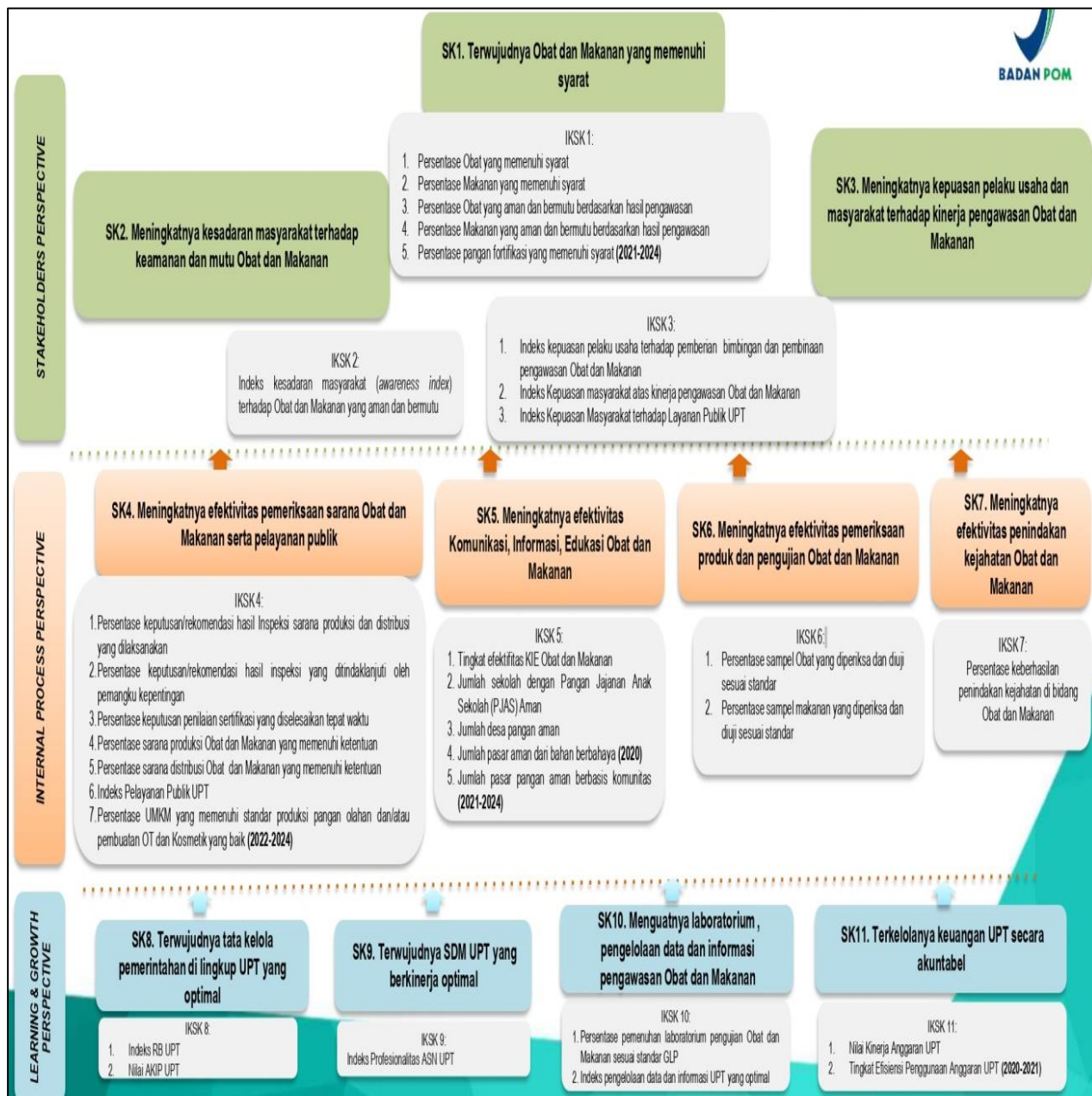


Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024



SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung yang berdasarkan hasil reviu dirubah menjadu sebagai berikut



Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1
Perubahan
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97.5	98	98.5
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95.5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91.1	92.3	93.4	94.6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77.83	80.22	82.62	85.01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-



2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor. HK.02.02.103.1031.06.20.1060B tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung
Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat		97.5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95.5
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		72
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung		90.50
4.	Meningkatnya efektivitas	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana		97



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	produksi dan distribusi yang dilaksanakan		
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		71
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		91
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		61
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		76
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung		4,45
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik		77
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		76
		19. Jumlah desa pangan aman		28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		13
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		67
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung		83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung		85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung		80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		84
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal		2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung		95.3
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung		-



2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2022, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan RKT Tahun 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 59.824.775.000.

**Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung
Tahun 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat		97.5
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95.5
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		72
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung		90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		97
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		71
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		91
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		61
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		76

**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEMULA	TARGET MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung		4.45
		16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik		77
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		76
		19. Jumlah desa pangan aman		28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		13
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		67
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung		83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung		85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung		80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		84
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal		2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung		95.3
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung		-

Kegiatan :)

Anggaran (Menjadi)

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Rp. 59.824.775.000,-



2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Tahun 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	727.971.420,-
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%	82%	82%	82%	82%	82%	436.247.500,-
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	375.015.580,-
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%	72%	72%	72%	72%	72%	234.902.500,-
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				72%	72%	72%	80.526.000,-
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu					74	45.712.000,-	
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					92.3	204.200.000,-	
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan					80.22	30.720.000,-	
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung					90.50	25.202.500,-	
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97%	97%	97%	97%	97%	97%	267.880.000,-
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71%	71%	71%	71%	71%	71%	390.262.000,-
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%	91%	91%	91%	91%	91%	988.636.000,-
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	61%	61%	61%	61%	61%	61%	745.414.000,-



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B10	B11	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
		memenuhi ketentuan							
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%	76%	76%	76%	76%	76%	1.236.470.000,-
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung						4,45	25.202.500,-
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	30	36.67	63.33	70	93.33	77	624.875.000,-
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	8.549.580.000,-
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	20%	44%	70%	82%	76	977.871.000,-
		19. Jumlah desa pangan aman	25%	65%	85%	95%	100%	28	1.190.726.000,-
		20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas	20%	40%	90%	90%	90%	13	359.627.000,-
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	80%	90%	100%	618.228.000,-
		22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	80%	90%	100%	204.009.000,-
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	28%	41%	58%	61%	64%	67%	1.455.307.000,-
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung						83,8	4.322.083.000,-
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung						85.5	340.780.000,-
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung						80	25.028.978.000,-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						84	9.624.790.000,-
		28. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	398.285.000,-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	23.7	47.4	71.1	79	86.9	95.3	315.274.000,-
		30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung							



2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM** % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$







Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.5
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
X > 120%	$110\% \leq X \leq 120\%$	$90\% \leq X < 110\%$	$70\% \leq X < 90\%$	$50\% \leq X < 70\%$	$X < 50\%$



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



**TRIWULAN I
TAHUN 2022**



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI








3.2 REALISASI ANGGARAN



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2022 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada triwulan I tahun 2022 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2022

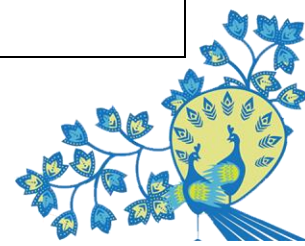
SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	98.10	BAIK	
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	90.09	BAIK	
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	78.64	CUKUP	
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	190.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	75.82	CUKUP	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	80.89	CUKUP	
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	214.61	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	



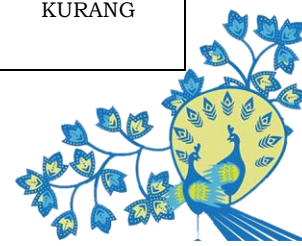
Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

**TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2022**

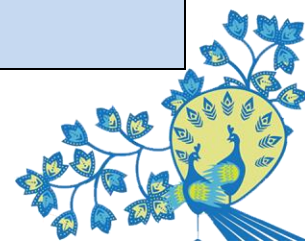
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	97.50%	97.50%	88.69%	90.97%	BAIK
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00%	82.00%	80.60%	98.29%	BAIK
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50%	95.50%	77.27%	80.91%	CUKUP
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00%	72.00%	85.71%	119.05%	SANGAT BAIK
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00%	72.00%	72.94%	101.31%	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN					98.10%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74,00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN					-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	92.30	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TARGET TW I	KRITERIA CAPAIAN
	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Makanan					
		8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	90.50	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97.00%	97,00%	100%	103,09%	BAIK
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00%	71,00%	77,94%	109,77%	BAIK
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00%	91,00%	67,52%	74,20%	CUKUP
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00%	61,00%	56,72%	92,98%	BAIK
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	76,00%	79,74%	104,92%	BAIK
		15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.45	4.45			DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar	77.00%	Progress 30%	Progress 16.67%	55.56%	KURANG



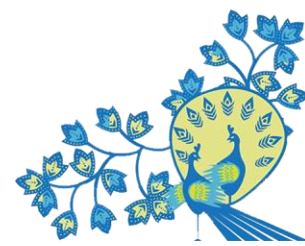
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I	KRITERIA CAPAIAN
		produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik					
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						90.09%	BAIK
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93,8	91,98	98,06%	BAIK
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	76	Progress 20%	Progress 15,80%	79%	CUKUP
		19. Jumlah desa pangan aman	28	Progress 25%	Progress 18,75%	75%	CUKUP
		20. Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	13	Progress 20%	Progress 12,5%	62.5%	KURANG
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						78.64%	CUKUP
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	10,00%	17,09%	170,90%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	10,00%	20,91%	209,10%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						190,00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67,00%	28,00%	21.23%	75.82%	CUKUP
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						75.82%	CUKUP
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.80	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.50	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
NILAI PENCAPAIAN SASARAN						-	



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I	KRITERIA CAPAIAN
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80.00	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00%	-	-	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25	2.25	1.82	80.89%	CUKUP
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				80.89%	CUKUP
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.30	23.70	50.86	214.61%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				214.61%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Pada triwulan I tahun 2022, terdapat dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria baik, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria cukup, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta empat (4) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada triwulan I Tahun 2022 berdasarkan *Perspective Balance Score Card* sebesar 102, dengan rincian Nilai Kinerja *Stakeholder Perspective* (35); Nilai Kinerja *Internal Process Perspective* (159) dan Nilai Kinerja *Learning and Growth Perspective* (65), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:



TABEL 3.3
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD
TRIWULAN I TAHUN 2022

PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIVE
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	98.10	33
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	-	
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	90.09	109
	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	78.64	
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	190.00	
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	75.82	
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	-	74
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	-	
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	80.89	
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	214.61	
NILAI KINERJA ORGANISASI			72

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini







**SASARAN
KEGIATAN
KE-1**

**TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG
MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM
DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **98.10%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4.



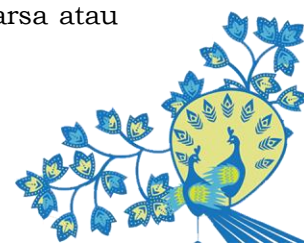
**TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TRIWULAN I TAHUN 2022**

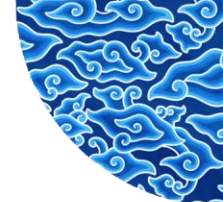
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.50%	88.69%	90.97%	BAIK	
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82.00%	80.60%	98.29%	BAIK	
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	95.50%	77.27%	80.91%	CUKUP	
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	72.00%	85.71%	119.05%	SANGAT BAIK	
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00%	72.94%	101.31%	BAIK	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			98.10%	BAIK	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:


1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2022. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

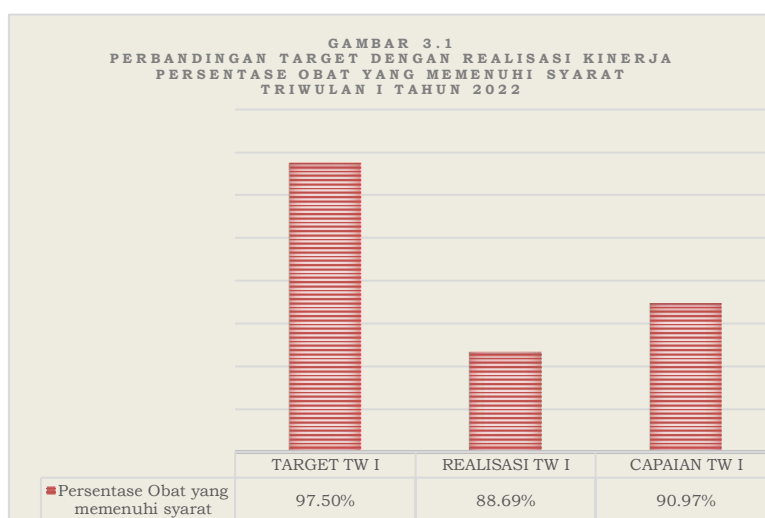




TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97.50%	88.69%	90.97%	BAIK 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 97,50%. Sebanyak 283 sampel acak telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 251 sampel memenuhi syarat, 32

sampel tidak memenuhi syarat. Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 88.69%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **90.97%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 97,50%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 90.97%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☰ Kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan dengan hasil sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan cukup baik yaitu sampai dengan triwulan I tahun 2022 adalah 81,48% (22 dari 27 sarana).



- ☸ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. KIE dilaksanakan melalui media sosial berupa infografis tentang Obat dan, media elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat tentang Obat dan Makanan.
- ☸ Sampai Triwulan I hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 31 sampel yaitu TMK Penandaan yang terdiri dari 10 sampel kosmetika, 1 sampel suplemen kesehatan dan 20 sampel obat tradisional dan 1 sampel obat tradisional TMS mutu pengujian dengan parameter uji kadar air.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☸ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- ☸ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat, *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Melaksanakan KIE Bersama lintas sektor (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).
- ☸ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyarakat tentang Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pembinaan juga dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.
- ☸ Penerapan sanksi pidana terhadap penanggungjawab di sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar/ tidak memenuhi standar yang dilarang beredar. Pengawasan terhadap produk Obat yang beredar selalu dilakukan melalui kegiatan Operasi Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya. Pada triwulan I, dilakukan operasi penindakan terhadap salah satu sarana distribusi obat tradisional Tanpa Ijin Edar/ tidak memenuhi standar mengandung bahan kimia obat piroksikam, sildenafil, parasetamol, Kofein, tadalafil dan sibutramin di Kab Bandung dilakukan proses penyidikan dalam rangka pemberian sanksi pidana. Kemudian dilakukan operasi penindakan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik TIE di sarana berupa rumah di Kab Bandung. Selain itu, tetap dilakukan



pengawasan melalui patroli siber terkait produksi/distribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar secara rutin.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- ☰ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- ☰ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Sampai dengan triwulan I tahun 2022 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 22 sarana.
- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung dan daring maupun melalui media elektronik dan media sosial.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☰ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun dengan tetap menjaga proses pencapaian target produksi selama triwulan I dapat dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring dan daring
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantaranya dengan pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat secara daring maupun tatap muka.
- ☰ Peningkatan kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat



yang diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakukan melalui Media Sosial.

- ✎ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ✎ Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Korwas POLDA Jabar, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Lembaga penegak hukum yg lain. Dilakukan beberapa pertemuan guna menyamakan persepsi terkait kelengkapan berkas perkara dan prosedur hukum yg berlaku. Ada juga beberapa kesepakatan yg sudah disetujui dengan lintas sektor terkait penyelesaian berkas perkara. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara BBPOM di Bandung POM dan lintas sektor terkait agar dapat mendukung penyelesaian berkas perkara dalam rangka mencapai target kinerja yg telah ditetapkan.
- ✎ Melaporkan hasil evaluasi penandaan Obat ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen.
- ✎ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan dalam pelatihan dan kegiatan yang diadakan BBPOM Bandung dan Badan POM. Pelatihan dan kegiatan yang dilakukan antara lain Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penerbitan SP-PIRT berbasis OSS RBA tanggal 1 Maret 2022 dan Kegiatan Pertemuan Lintas Sektor Anti Microbial Resistance (AMR) tanggal 31 Maret 2022

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


2. PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Sampel acak yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 146 sampel. Terdapat pengiriman sampel regionalisasi pangan yang diuji di Balai Besar POM di Jakarta untuk bumbu masak pala, Tepung Jagung (uji okratoksin) dan AMDK (uji logam dan pH). Sedangkan pengiriman yang dilakukan di Balai Balai Besar POM di Yogyakarta untuk kategori Kat.Pang 1 (Ikan Olahan dan produk susu) untuk uji logam. Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk

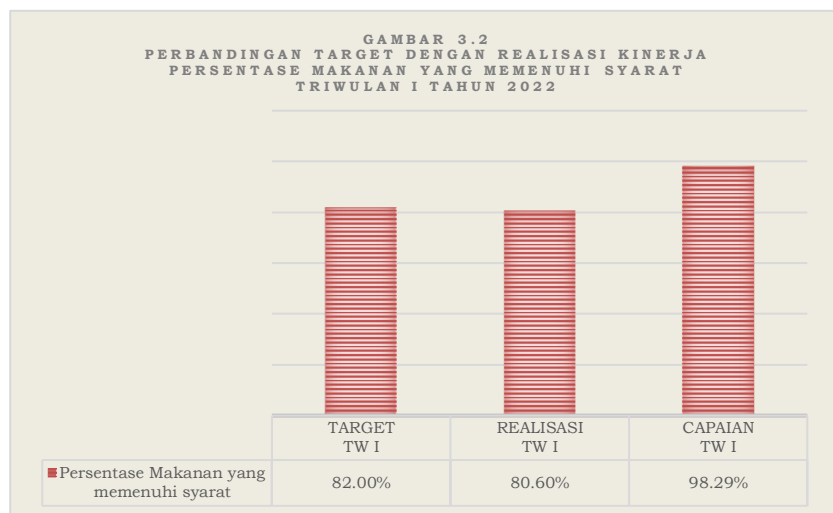


Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

**TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

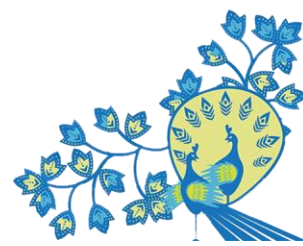
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	82,00%	80,60%	98,29%	Baik 

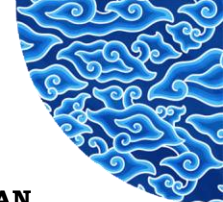
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah

sebesar 82,00%. Realisasi pada triwulan I tahun 2022 sebesar 80,60%, dengan rincian 108 sampel memenuhi syarat dan 26 sampel tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 134 sampel. Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **98,29%** dengan kriteria **Baik**.





B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 98,29%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebahagiaan capaian kinerja indikator ini pada triwulan I tahun 2022 ini disebabkan oleh:

- ☛ Terdapat peningkatan jumlah sarana produksi makanan yang memenuhi ketentuan yang diperiksa pada triwulan I yaitu sebanyak 16 sarana. Peningkatan ini merupakan dampak inisiatif dari sarana produksi makanan dalam kepatuhan pemenuhan GMP dari sarana produksi yang diperiksa.
- ☛ Sampai dengan triwulan I terdapat 26 sampel TMS hasil pengujian, dimana sebagian besar berasal dari sampel yang melebihi persyaratan parameter uji kimia dengan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi persyaratan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☛ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa infografis dan IG Live Kelom Geulis maupun elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan Radio.
- ☛ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☛ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☛ Penerapan sanksi pidana terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan makanan Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar antara lain melalui kegiatan Operasi Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat prioritasnya. Pada triwulan I tahun 2022 telah dilakukan operasi penindakan pada sarana produksi pabrik tahu di Kab Bogor yang memproduksi tahu mengandung formalin dan menjualnya ke pasar-pasar di Kab Bogor, Bekasi, Tangerang dan Jakarta. Pada triwulan I



tahun 2022 dilakukan pengawasan melalui patroli siber terkait produksi/distribusikan pangan yang dilarang beredar. Untuk tindak lanjut dari patroli siber yang sudah dilakukan adalah melaporkan hasil patroli siber dan kemudian akan dilakukan *take down* oleh Badan POM Pusat.

- ☪ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram dan Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat).

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☪ Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh Balai Besar POM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD, Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sampai dengan triwulan I tahun 2022, jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 40 sarana.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- ☪ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio. Sampai dengan triwulan I tahun 2022, KIE melalui media social sebanyak 243 posting.
- ☪ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yaitu sebanyak 40 sarana produksi yang diperiksa pada triwulan I tahun 2022.
- ☪ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan, yaitu sebanyak 35 sarana distribusi yang diperiksa pada triwulan I tahun 2022.
- ☪ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.



- ☛ Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen


F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

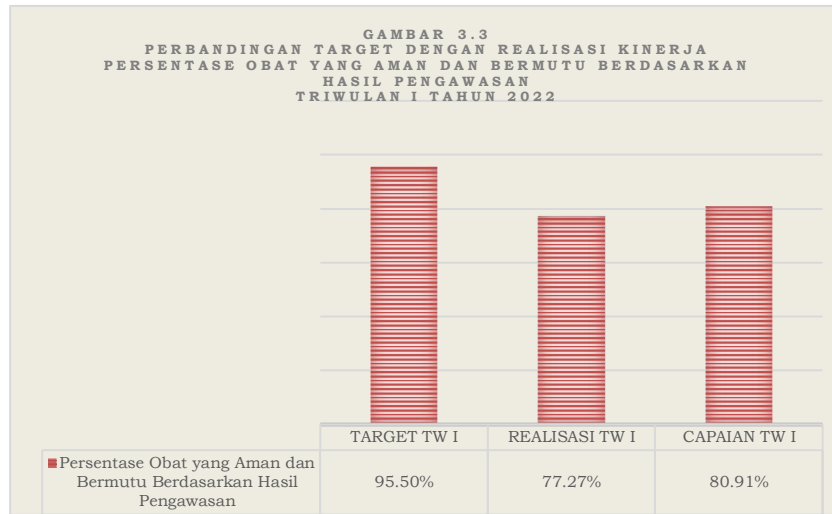
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2022. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka., Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7.

**TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50%	77.27%	80.91%	Cukup	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 95.50%. Sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 66

sampel dengan rincian sebanyak 51 sampel memenuhi syarat dan 15 sampel tidak memenuhi syarat, sehingga persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 77.27%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **80.91%** dengan kriteria **Cukup**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95.50%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 80.91%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☛ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling.
- ☛ Pada triwulan I tahun 2022, sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan meningkat menjadi 88 sarana dari 116 sarana yang diperiksa.
- ☛ Sampai Triwulan I dari 66 sampel yang diperiksa dan diuji terdapat 15 sampel yang TMK Penandaan, yang berasal dari 11 sampel kosmetika, 3 sampel Obat Tradisional, dan 1 sampel Suplemen Kesehatan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:



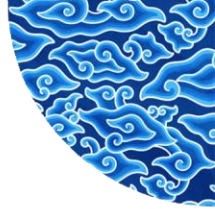
- ✎ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter), media masa melalui iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.
- ✎ Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ✎ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE)/ tidak memenuhi standar yang dilarang beredar. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat luas.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja:

- ✎ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dilakukan sesuai perencanaan pada triwulan I. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- ✎ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada triwulan I tahun 2022 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 27 sarana.
- ✎ Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada triwulan I tahun 2022 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 116 sarana.





E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

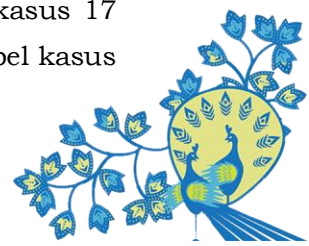
- ☸ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB. Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan setiap minggu.
- ☸ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung maupun melalui media sosial berupa infografis tentang Obat dan Makanan.
- ☸ Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan POM yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- ☸ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat. Pembinaan dan pelayanan informasi tentang Obat dan Makanan terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- ☸ Dengan adanya ancaman hukuman pidana yang diterapkan, diharapkan dapat memberikan peringatan dan memunculkan efek jera kepada para pelaku kejahatan di Bidang Obat dan Makanan. Pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang Obat dan Makanan masuk pada sanksi pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Langkah ini merupakan penerapan sanksi yg sifatnya terakhir dan dilakukan dengan banyak pertimbangan

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


4. PRESENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Sampel targeted yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 86 sampel yang meliputi sampel PJAS 36 sampel, sampel kemasan 3 sampel, sampel kasus 17 sampel dan sampel UMKM 26 sampel dan sampel lain sebesar 4 sampel. Sampel kasus

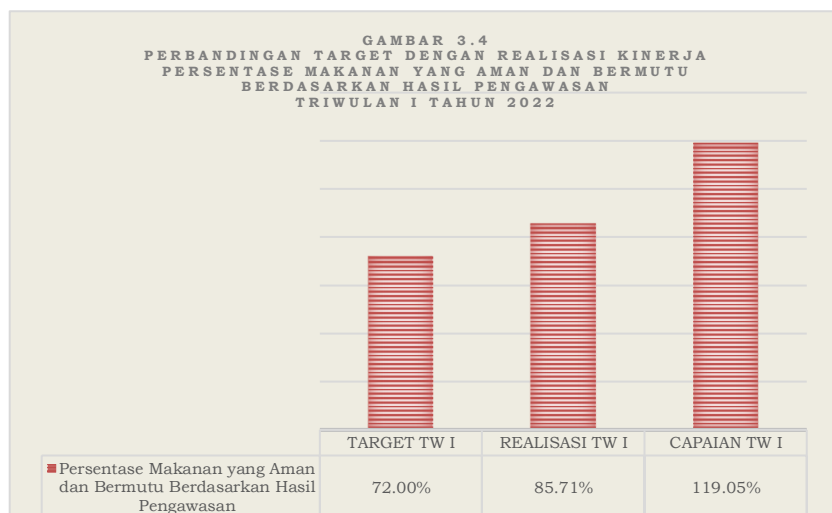


terdiri dari sampel Kasus AMDK Galon isi sebanyak 4 sampel, Tahu berfomalin (pengaduan konsumen) 5 sampel dan sampel kasus Mie (diuji di PPOMN) 8 sampel. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8.

**TABEL 3.8.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	72,00%	85,71%	119,05%	Sangat Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun

2022 adalah sebesar 72,00%. Persentase Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2022 sebesar



85,71%, dengan rincian sebanyak 12 sampel targeted memenuhi syarat dan 2 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 14 sampel targeted. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **119,05%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 72,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 119,05%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebahagiaan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☪ Adanya perubahan definisi operasional sasaran kinerja, dimana pangan fortifikasi tidak termasuk dalam pengukuran indikator kinerja ini, karena yang berkontribusi sangat besar untuk sampel TMS berasal dari pangan fortifikasi. Sampai dengan triwulan I tahun 2022 hasil pengujian sampel makanan baru 6,14% (14 sampel dari total 228 sampel) sehingga belum menggambarkan hasil pengujian secara keseluruhan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- ☪ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☪ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :



- ☪ Telah dilaksanakannya Sebagian tahapan kegiatan program nasional keamanan pangan yang meliputi PJAS Aman, Gerakanan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di 2 Kab/Kota

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut :

- ☪ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter.
- ☪ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- ☪ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.
- ☪ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


5. PRESENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Sampel pangan Fortifikasi yang telah disampling sampai Triwulan I adalah sebanyak 95 sampel yang terdiri dari sampel garam beryodium sebesar 85 sampel dan sampel terigu sebesar 10 sampel. Terdapat pengiriman sampel Regionalisasi untuk terigu ke Balai Besar POM di Jakarta untuk pengujian DON. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian.

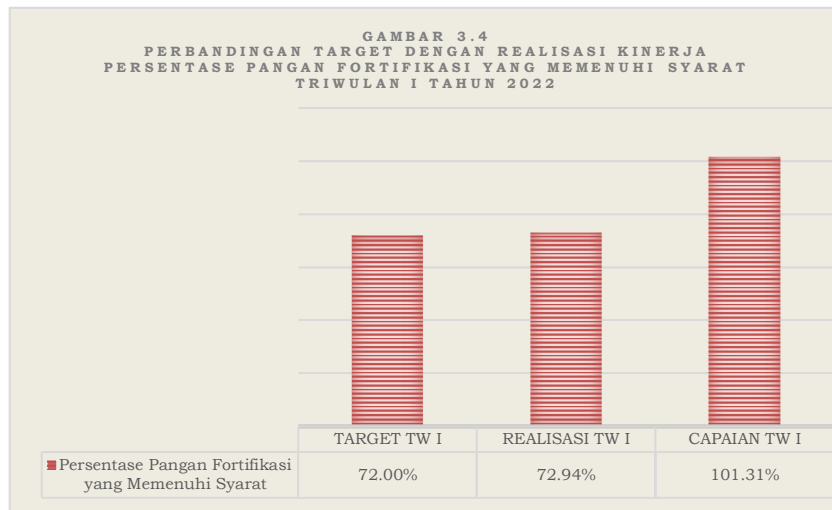


Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9.

**TABEL 3.9.
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	72,00%	72,94%	101,31%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



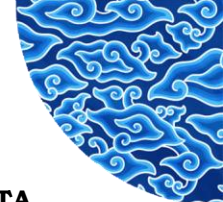
Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun

2022 adalah sebesar 72,00%. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2022 sebesar 72,94%, dengan rincian sebanyak 62 sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat dan 23 sampel fortifikasi tidak memenuhi syarat dari total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 85 sampel pangan fortifikasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **101,31%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 72,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 101,31%.





C. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain :

- ☸ Pada triwulan I tahun 2022 hasil pengujian sampel makanan yang TMS sebagian besar berasal dari sampel fortifikasi garam beryodium, yaitu sebanyak 23 sampel mengandung KIO₃ yang substandard. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang memenuhi standar.
- ☸ Belum terpenuhinya GMP sarana produksi garam, dimana sebagian besar sarana produksi garam masih merupakan UMKM.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☸ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan, terutama sarana produksi garam terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☸ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Twitter) serta iklan layanan masyarakat bekerjasama dengan radio.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☸ Meningkatnya pemahaman dari pelaku usaha tentang aspek CPPOB serta kesadaran untuk mempertahankan pemenuhan aspek CPPOB tidak hanya pada saat di inspeksi namun sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati sarana produksi.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☸ Indikator ini baru ditambahkan di triwulan I sehingga belum ada rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.



F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-2

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Interprestasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

TABEL 3.10
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

SKOR	INTERPRESTASI
$\leq 45,00$	TIDAK BAIK
45,01 - 60,00	KURANG BAIK
60,01 - 75,00	CUKUP BAIK
75,01 - 90,00	BAIK
$\geq 90,01$	SANGAT BAIK



**SASARAN
KEGIATAN
KE-3**

**MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran.

**1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP
PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman.

**2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator



yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomo 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

**TABEL 3.11
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM**

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

**SASARAN
KEGIATAN
KE-4**








**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN
PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator yang seluruhnya Merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keenam indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **90,09%** dengan



kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.12.

**TABEL 3.12
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-1
TRIWULAN I TAHUN 2022**


INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97,00%	100%	103,09%	BAIK	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71,00%	77,94%	109,77%	BAIK	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91,00%	67,52%	74,20%	CUKUP	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61,00%	56,72%	92,98%	BAIK	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00%	79,74%	104,92%	BAIK	
6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	4.45			DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Progress 30%	Progress 16.67%	55.56%	KURANG	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			90.09%	BAIK	

1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

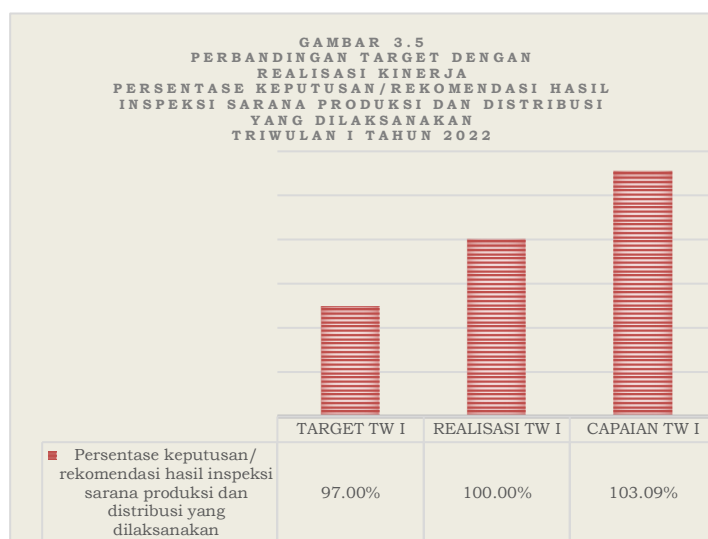
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n.



TABEL 3.13
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	97,00%	100%	103,09%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



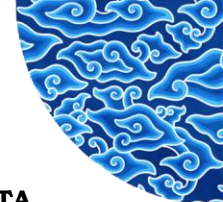
Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 97,00%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022 sebesar 103,09%. Dengan

rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT belum ada; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain belum ada; dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **103,09%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 97,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 103,09%.





C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☰ Respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan meningkat
- ☰ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan sudah baik dengan cara pengumpulan data melalui google drive. Data diperoleh dari dokumen fisik, SIKD, email corporate dan aplikasi SIPANDA.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☰ Pengumpulan dan pengolahan data sudah difasilitasi oleh Aplikasi Monalisa, namun belum menyeluruh dan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga aplikasi Monalisa perlu disempurnakan kembali
- ☰ Petugas dimudahkan dalam pengumpulan data dengan adanya disposisi persuratan kepada petugas pengolah.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☰ Penggunaan aplikasi Monalisa sudah dilaksanakan secara konsisten
- ☰ Frekuensi pemantauan tindak lanjut dari pemangku kepentingan dilakukan seminggu sekali dengan konsisten

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☰ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☰ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan, antara lain:

- ☰ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2022.




F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

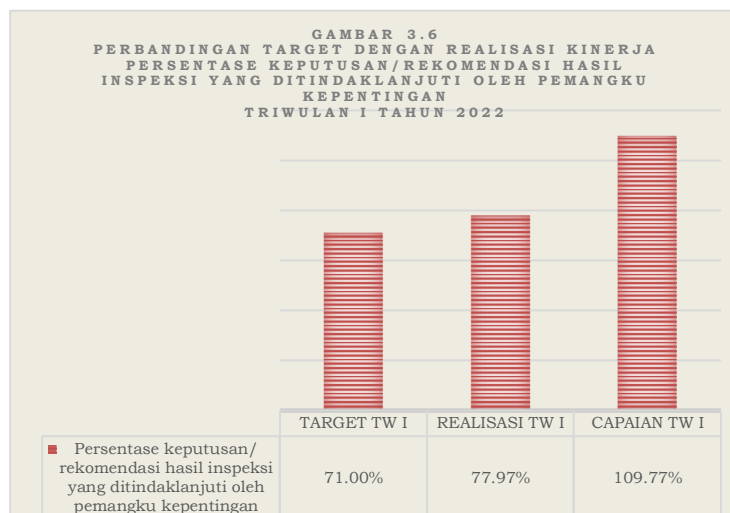
2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d tahun berjalan.

TABEL 3.14
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71,00%	77,94%	109,77%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 71,00%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

pada triwulan I sebesar 77,94%. Dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 77,94% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tidak ada. Dengan demikian persentase capaian



target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **109,77%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2021

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator sasaran tersebut adalah sebesar 71,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 109,77% dengan kriteria Baik.

C. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☰ Respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan meningkat
- ☰ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan sudah baik dengan cara pengumpulan data melalui google drive. Data diperoleh dari dokumen fisik, SIKD, email corporate dan aplikasi SIPANDA.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

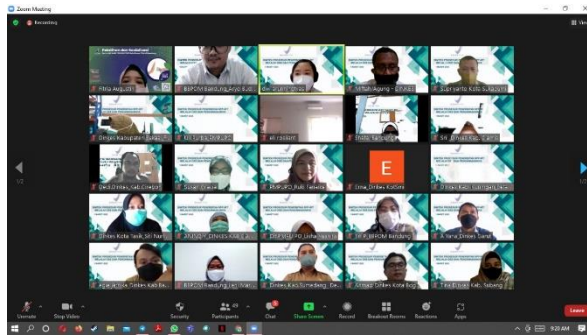
- ☰ Pengumpulan dan pengolahan data sudah difasilitasi oleh Aplikasi Monalisa, namun belum menyeluruh dan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga aplikasi Monalisa perlu disempurnakan kembali
- ☰ Petugas dimudahkan dalam pengumpulan data dengan adanya disposisi persuratan kepada petugas pengolah data.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☰ Penggunaan aplikasi Monalisa sudah dilaksanakan secara konsisten
- ☰ Frekuensi pemantauan tindak lanjut dari pemangku kepentingan dilakukan seminggu sekali dengan konsisten
- ☰ Koordinasi dengan pusat dan lintas sektor berupa Kegiatan FGD Penerbitan SP-PIRT berbasis OSS RBA tanggal 1 Maret 2022





Gambar 3.6 Kegiatan FGD Penerbitan SP-PIRT berbasis OSS RBA

- ☪ Koordinasi dengan pusat dan lintas sektor berupa Kegiatan Pertemuan Lintas Sektor Anti Microbial Resistance (AMR) tanggal 31 Maret 2022



Gambar 3.7 Kegiatan Pertemuan Lintas Sektor Anti Microbial Resistance (AMR)

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☪ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☪ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindaklanjut yang direncanakan, antara lain:

- ☪ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2022.
- ☪ Pelaksanaan kegiatan Sangkuriang yang berupa FGD Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi di wilayah masing-masing.
- ☪ Pemberdayaan Grup Whatsapp Forum Komunikasi antara BBPOM di Bandung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wilayah Jawa Barat dalam



memberikan informasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana di wilayah masing – masing.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☰ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☰ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan, antara lain:

- ☰ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2022.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

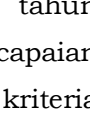
Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Rekomendasi/keputusan/Izin penerapan CPPOB pendaftaran produk pangan pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Rekomendasi Importir Kosmetik/Badan Usaha Pemberi Kontrak Kosmetik sebagai Pemohon Notifikasi; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; (8). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan (9) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.



TABEL 3.15
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91,00%	67,52%	74,20%	CUKUP 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

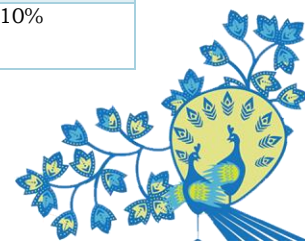


Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 91%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan I tahun 2022 sebesar

67,52%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 368 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 545 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **74,20 %** dengan kriteria **Cukup**.

TABEL 3.16
HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI
SD TRIWULAN I TAHUN 2022

No.	Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% Sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	0	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	154	162	105,19%
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	190	45	23,68%
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak	Sertifikat	201	161	80,10%



ketiga				
TOTAL		545	368	67,52%

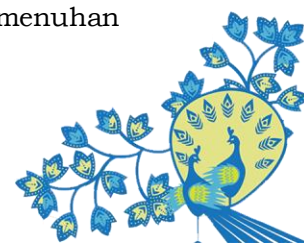
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 67,52% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 74,20%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada triwulan I tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut :

- ✦ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memudahkan pelaku usaha khususnya di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka sertifikasi terkait perizinan usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Import (API).
- ✦ Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual, di tahun 2022 ini beralih ke sistem elektronik yang berlaku untuk semua komoditi baik obat tradisional, kosmetik maupun pangan.
- ✦ Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan



(time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika. Terkait pelaksanaannya, permohonan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik ini berubah dari manual ke sistem elektronik melalui PB-UMKU di sistem/aplikasi OSS.

- ✎ Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB. Dalam hal pengajuan permohonannya pun kini berubah dari yang sebelumnya diajukan langsung di e-sertifikasi, saat ini masih di e-sertifikasi namun pendaftaran masuk melalui PB-UMKU di sistem/aplikasi OSS yang selanjutnya akan terhubung ke sistem/aplikasi e-esertifikasi.
- ✎ Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi izin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Badan POM No. 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik maka terdapat perubahan mekanisme dalam rangka pendaftaran pangan, yang sebelumnya pengajuan permohonan rekomendasi PSB melalui email ke UPT menjadi permohonan izin Penerapan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id sehingga diperlukan sosialisasi lebih detail kepada pelaku usaha terkait prosedur baru tersebut.

Berdasarkan peraturan ini, rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan secara online dibagi berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko dari produk yang akan didaftarkan.

Pemeriksaan sarana yang sebelumnya merupakan syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mendapatkan rekomendasi, saat ini hal tersebut sudah tidak diberlakukan. Sesuai dengan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021, pemeriksaan sarana yang dilakukan di awal, hanya berlaku untuk perusahaan dengan skala menengah dan besar, sedangkan untuk perusahaan dengan skala usaha mikro dan kecil maka penilaian dilakukan melalui evaluasi dokumen dan pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 1 (satu) tahun setelah terbit izin penerapan CPPOB.

- ✎ Tidak seperti yang berlaku sebelumnya pada saat PSB, pemeriksaan terhadap sarana Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan (industri pangan dengan skala usaha menengah dan besar) ini dilakukan setelah dokumen



panduan mutu yang disubmit di sistem/aplikasi e-sertifikasi dinyatakan lengkap terlebih dahulu, setelah itu petugas/evaluator dapat menjadwalkan pemeriksaan sarana.

- ✿ Pemahaman pelaku usaha terhadap dokumen yang harus disiapkan dan diupload di sistem/aplikasi e-sertifikasi sangat mempengaruhi proses penerbitan rekomendasi/izin penerapan CPOTB/CPKB/CPPOB. Dari hasil evaluasi dokumen yang telah dilakukan, sebagian besar dokumen yang disubmit masih belum lengkap sehingga para pelaku usaha tersebut membutuhkan waktu untuk melengkapi dokumen panduan mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan tersebut.
- ✿ Terbitnya PerBPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran sehingga mengubah pengajuan permohonan rekomendasi sarana distribusi untuk importir pangan yang sebelumnya diajukan ke UPT Balai Besar POM Di Bandung kini diajukan ke Badan POM melalui Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Dalam hal penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Ekspor, capaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan, karena didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

- ✿ Keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung.
- ✿ Adanya aplikasi e-bpom yang memfasilitasi layanan proses perizinan eksportasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung semakin stabil, selain itu kompetensi dan komitmen SDM evaluator yang tinggi sehingga dapat melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan dan memenuhi timeline yang telah ditetapkan.
- ✿ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
- ✿ Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah SDM sangat kurang dibandingkan dengan beban kerjanya.



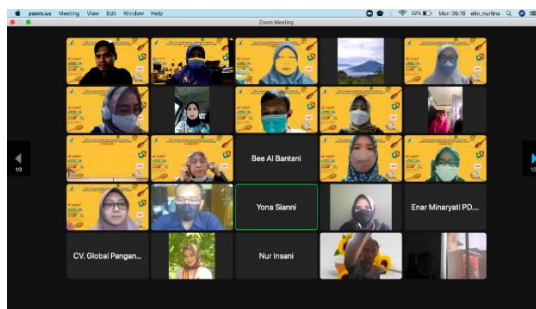
Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ✎ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/*workshop*/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ✎ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ✎ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- ✎ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- ✎ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya.
- ✎ Pada tanggal 17 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan merupakan kegiatan yang ditujukan bagi pelaku usaha pangan yang sedang berproses dalam permohonan Izin Penerapan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id. Penyelenggaraan kegiatan Desk CAPA secara rutin sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CAPA-nya lebih diminimalisir hal ini berdampak pada pencapaian jumlah rekomendasi yang dikeluarkan semakin meningkat.



Gambar 3.9 Kegiatan Desk CAPA

- ✎ Pada tanggal 25-26 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA merupakan kelanjutan dari kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 17



Januari 2022. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan, Pendaftaran Akun dan Dokumen Panduan Mutu, Pemaparan Materi Panduan Mutu Butir 1 -10, Alur Proses Produksi dan Pengendalian Proses, kemudian dilanjutkan dengan Desk Akun E-Sertifikasi dan Desk Penyusunan SOP antara pelaku usaha dengan Evaluator.



Gambar 3.10 Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA

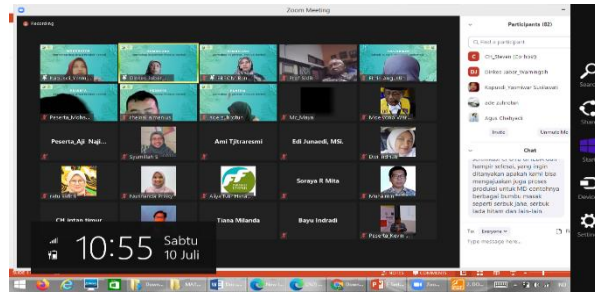
- Pada tanggal 15-16 Maret 2022 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang diikuti oleh 48 pelaku usaha yang telah diaudit PSB oleh Balai Besar POM Di Bandung. Pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan secara online oleh petugas dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 18 nomor izin edar (NIE) dan 10 akun perusahaan.



Gambar 3.11 Kegiatan Sosialisasi Registrasi Pangan dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan

- Dilaksanakan pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dalam acara Workshop Registrasi Produk Herbal bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran pada tanggal 7 Juli 2021 melalui zoom meeting.





Gambar 3.12 Pembinaan kepada para pelaku usaha obat tradisional dalam acara Workshop Registrasi Produk Herbal

- ☰ Pendampingan/fasilitasi registrasi melalui online dengan fasilitator/petugas sertifikasi.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Adapun Rekomendasi yang belum dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2021 (Kendala dan Permasalahan).

- ☰ Upaya peningkatkan kompetensi evaluator belum dilaksanakan karena belum adanya kegiatan dari BPOM terkait updating informasi maupun regulasi yang melibatkan BBPOM Di Bandung.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam hal regulasi dalam hal perizinan melalui pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait persyaratan dan tahapan/prosedur yang harus dipenuhi.

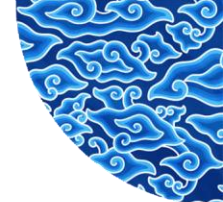
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☰ Petugas/evaluator di BBPOM di Bandung mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman SMKPO dan Izin Penerapan CPPOB yang diadakan secara daring oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM pada tanggal 8 Februari 2022.
- ☰ Petugas/evaluator di BBPOM di Bandung mengikuti kegiatan Diseminasi Pedoman dan Tools Pemeriksaan Sarana Produksi dan Peredaran Pangan Olahan pada tanggal 22 Februari 2022.
- ☰ Pada tanggal 25 Januari 2022 petugas BBPOM Bandung mengikuti Sosialisasi PerBPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Produksi Kosmetika Yang Baik yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.






4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

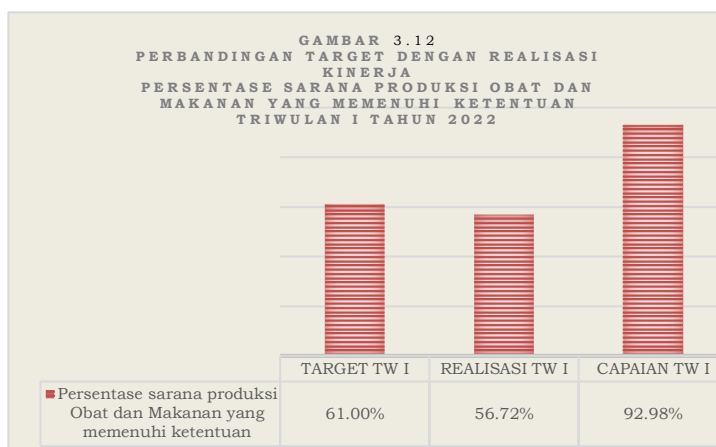
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun n.

TABEL 3.17
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61,00%	56,72%	92,98%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

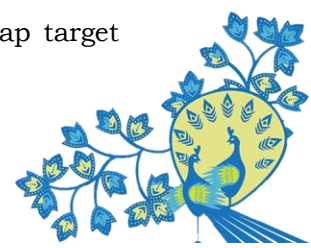
Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 61%. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 sebesar



56,72%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **92,98%** dengan kriteria **Baik**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 38 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 67 sarana.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 61,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target

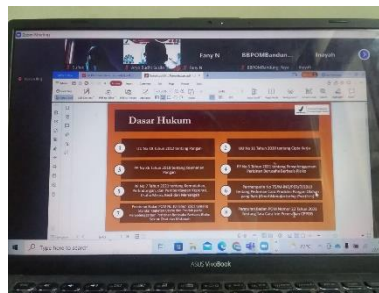


tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 92,98% dengan kriteria **Baik**.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS CAPAIAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☪ Pemenuhan kepatuhan GMP sarana produksi obat dan makanan cukup baik.
- ☪ Pelaksanaan jadwal pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan
- ☪ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan konsisten.
- ☪ Pelaksanaan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi belum maksimal.
- ☪ Peningkatan kompetensi petugas melalui diseminasi pada bulan 22 Februari 2022 (Form 68 Produksi Pangan).



Gambar 3.13 Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☪ Meningkatkan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan,
- ☪ Melakukan monitoring dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☪ Mengadakan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
- ☪ Mengadakan webinar untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam pemenuhan GMP

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:



- ☰ Membuat perencanaan prioritas pemeriksaan sarana produksi berdasarkan analisis resiko.
- ☰ Membuat perencanaan jadwal dinas pemeriksaan sarana secara bulanan.
- ☰ Melakukan monitoring terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana setiap minggu melalui google drive koordinasi jadwal dinas.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☰ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan tindaklanjut pada tahun 2022 sebagai berikut:

- ☰ Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun


F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

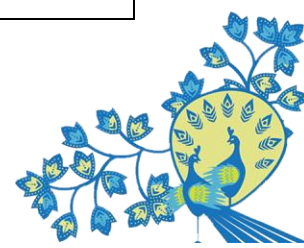
Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

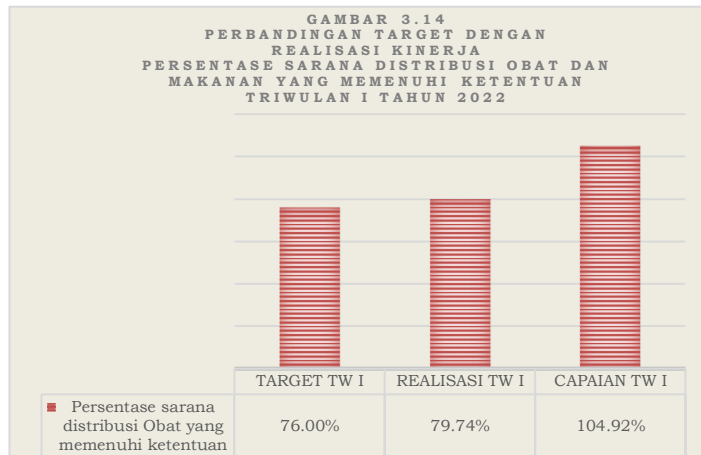
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun n.

**TABEL 3.18
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	76,00%	79,74%	104,92%	Baik 



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Target Triwulan I tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 76%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 sebesar 79,74%. Dengan demikian

persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **104,92%** dengan kriteria **Baik**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 181 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 227 sarana.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I DENGAN TARGET TAHUN 2021

Target tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 76,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 104,92%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebahagiaan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☼ Pemenuhan kepatuhan GMP sarana produksi obat dan makanan cukup baik.
- ☼ Pelaksanaan jadwal pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan
- ☼ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan konsisten.
- ☼ Pelaksanaan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi belum maksimal.
- ☼ Peningkatan kompetensi petugas melalui diseminasi pada bulan 22 Februari 2022 (Form 96 Distribusi Pangan).
- ☼ Pemeriksaan sarana melalui media daring selama masa PPKM (periode bulan Februari 2022)





Gambar 3.15 Kegiatan Pemeriksaan Sarana melalui media daring
Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☪ Meningkatkan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan mengikuti pelatihan,
- ☪ Melakukan monitoring dan evaluasi *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☪ Mengadakan desk CAPA terhadap temuan hasil pemeriksaan sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
- ☪ Mengadakan webinar untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam pemenuhan GDP

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- ☪ Membuat perencanaan prioritas pemeriksaan sarana produksi berdasarkan analisis resiko.
- ☪ Membuat perencanaan jadwal dinas pemeriksaan sarana secara bulanan.
- ☪ Melakukan monitoring terhadap rencana pelaksanaan terhadap pemeriksaan sarana setiap minggu melalui google drive koordinasi jadwal dinas.

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☪ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- ☪ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan tindaklanjut pada tahun 2022 sebagai berikut:



- ☛ Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); (2) Profesionalitas SDM (18%); (3) Sarana Prasarana (15%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); (6) Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama). Dengan Kategori nilai sebagai berikut:

Tabel 3.19
Kategori Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C -	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B -	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A -	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

7. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK


Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut : (1) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD; (2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum



tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor; dan (3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Sedangkan kriteria UMKM yang memenuhi standar adalah: 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ; 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

**TABEL 3.20
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Progress 30,00%	Progress 16,67%	55,56%	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA `TRIWULAN I TAHUN 2022

Pada tahun 2022, target ng ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 77% untuk jumlah UMKM yang memenuhi standar. Sedangkan penilaian terhadap capaian triwulan adalah untuk tahapan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Pada TW 1 di tahun 2022, target untuk TW 1 adalah sebesar 30% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan



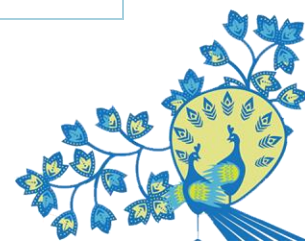
pendampingan UMKM pada TW 1 adalah 16,67%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi dan pelaksanaan bimtek UMKM pangan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **55,56 %** dengan kriteria **Kurang**.

**TABEL 3.21
TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN, KOSMETIK DAN OT**

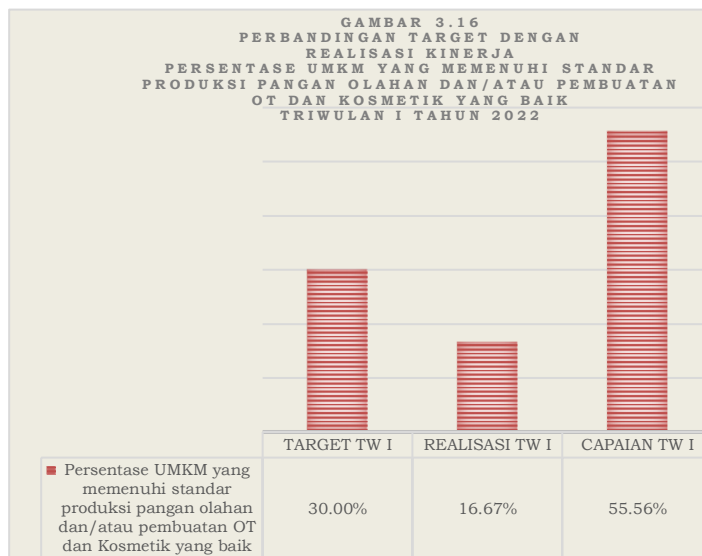
	TAHAPAN	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelaksanaan	
Obat Tradisional	1 Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari	Jumlah 5
	2 Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	30%	Maret-April	
	3 Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40%	70%	Maret-Oktober	
	4 Sertifikasi	20%	90%	September-November	
	5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan	
Total Progres					
Kosmetik	1 Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	Jumlah 8
	2 BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret	
	3 Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November	
	4 Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November	
Total Progres					
Pangan	1 Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	Jumlah 25
	2 Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei	
	3 Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September	
	4 PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November	
	5 Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember	

**TABEL 3.22
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN. OT DAN KOSMETIK
SD TRIWULAN I TAHUN 2022**

No.	Komoditi	Jumlah UMKM Yang Didampingi	Penetapan UMKM	Bimtek UMKM	% tahapan kegiatan pendampingan
1	Pangan	25	10%	20%	10%
2	Obat Tradisional	5	10%	0%	3,33%
3	Kosmetik	8	10%	0%	3,33%
TOTAL					16,67%



B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 77% untuk jumlah UMKM yang memenuhi standar. Sedangkan penilaian terhadap capaian triwulan adalah untuk tahapan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan. Pada

triwulan 1 di tahun 2022, target untuk TW 1 adalah sebesar 30% untuk tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM pada TW 1 adalah 16,67%. Dengan rincian tahapan yang telah dilaksanakan adalah tahapan penetapan UMKM pangan, kosmetik dan obat tradisional yang akan didampingi dan pelaksanaan bimtek UMKM pangan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **55,56 %**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 77,00%. Untuk target akhir (UMKM yang memenuhi standar) realisasi di TW 1 masih 0% karena baru dilaksanakan tahapan awal pendampingan. Sedangkan untuk tahapan kegiatannya, pada TW 1 telah dilaksanakan 16,67%, jika realisasi kinerja pada triwulan I sebesar 30% dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 55,56%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar pada triwulan I tahun 2022 belum memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan hal-hal berikut ini:

- ☛ Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan di tahun 2022, sehingga kegiatan ini belum berjalan sesuai agenda yang ditetapkan.



- ✎ Petunjuk pelaksanaan pendampingan Obat Tradisional dan Kosmetik baru disampaikan pada Bulan Maret 2022.
- ✎ Terjadi kesulitan dalam menetapkan UMKM Obat Tradisional yang akan didampingi, karena kurangnya data UMKM tersebut.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ✎ Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pendampingan dan pembinaan UMKM. BBPOM Bandung berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan usulan dan masukan pelaku usaha mana yang akan difasilitasi, diantaranya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan inkubator-inkubator UMKM dari perguruan tinggi. Di awal proses ini lintas sektor tersebut akan mencari UMKM binaannya dan menyeleksi UMKM yang akan dicalonkan sebagai UMKM yang akan difasilitasi.
- ✎ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis untuk mendukung kegiatan pendampingan UMKM sebagai fasilitator.
- ✎ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- ✎ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.
- ✎ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

- ✎ Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang tahapan proses perizinan berusaha, termasuk proses perizinan yang berlaku di Badan POM. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dalam hal tata cara dan prosedur perizinan yang bertujuan untuk memberikan adanya kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha.
- ✎ Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur tentang seluruh tahapan proses perizinan termasuk yang berada di bawah kewenangan Badan POM dan dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya.



- ✎ Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur tentang kemudahan untuk UMKM.
- ✎ Terbitnya PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, yang merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi ijin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan.
- ✎ Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetika, mempercepat waktu pemenuhan (time line) dikeluarkannya rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika.
- ✎ Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB.
- ✎ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

- ✎ Pada tanggal 17 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang merupakan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan adanya kegiatan pendampingan bagi UMKM yang dilakukan oleh BBPOM.





Gambar 3.17 Kegiatan Desk CAPA

- Pada tanggal 25-26 Januari 2022 dilaksanakan Kegiatan Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA merupakan kelanjutan dari kegiatan Desk Evaluasi Dokumen Izin Penerapan CPPOB dan Sosialisasi Kegiatan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 Januari 2022. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan materi terkait Penerapan Prinsip CPPOB pada Industri/UMKM Pangan Olahan, Pendaftaran Akun dan Dokumen Panduan Mutu, Pemaparan Materi Panduan Mutu Butir 1 -10, Alur Proses Produksi dan Pengendalian Proses, kemudian dilanjutkan dengan Desk Akun E-Sertifikasi dan Desk Penyusunan SOP antara pelaku usaha dengan Evaluator. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu para pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen panduan mutu yang dipersyaratkan pada saat mengajukan permohonan izin penerapan CPPOB sehingga mereka dapat mengupload dokumen tersebut dan mulai berproses di sistem/aplikasi e-sertifikasi.

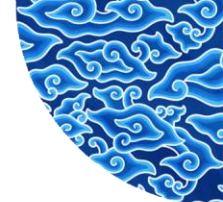


Gambar 3.18 Bimtek UMKM dan Evaluasi Desk CAPA

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.










**SASARAN
KEGIATAN
KE-5**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI,
EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM
DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **79,64%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.23.

**TABEL 3.23
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,8	91,98	98,06%	BAIK	
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Progress 20%	Progress 15,80%	79%	CUKUP	
3. Jumlah desa pangan aman	Progress 25%	Progress 18,75%	75%	CUKUP	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Progress 20%	Progress 12,5%	62.5%	KURANG	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			79,64%	CUKUP	

1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima



atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.


Penetapan hasil pengukuran indikator tersebut pada triwulan I, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor: B-HM.11.02.22.224.04.22.114 Tanggal 11 April 2022 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 1 tahun 2022.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun sebagai berikut:

**TABEL 3.24
KATEGORI PENILAIAN
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2022**

SKOR INDEKS 100	INTERPRESTASI EFEKTIFITAS
<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

**TABEL 3.25
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

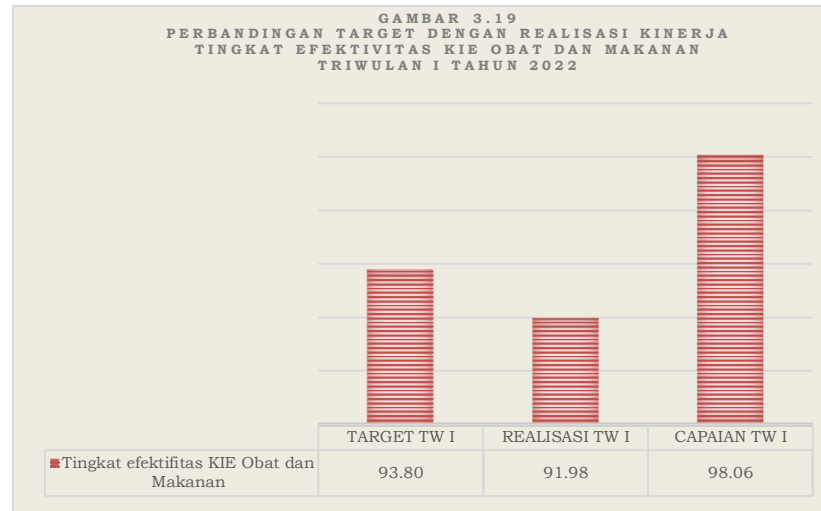
INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,8	91,98	98,06%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2022 adalah sebesar 93,8. Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan



akumulasi hingga Triwulan I tahun 2022 sebesar 91,98 (Sangat Efektif). dibawah Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tingkat nasional UPT sebesar 92,5 (Sangat Efektif). Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar **98,06%** dengan kriteria **Baik**.



B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93,80. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **98.06%** dengan kriteria **Baik**.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2022 disebabkan antara lain:

- ☪ Tim Medsos Balai Besar POM di Bandung memiliki program baru KAHARTOS (Kamus Harian Lewat Medsos). Program ini berisi definisi dari tiap kata yang ada di peraturan ataupun yang biasa digunakan pada isu terkini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu terkini.
- ☪ Penayangan informasi melalui Medsos yang konsisten dilakukan
- ☪ Penyelenggaraan konsultasi di Mall layanan publik di Kota Bekasi dan Kabupaten Bandung

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☪ Terus mengembangkan teknik dan kanal penyampaian materi KIE
- ☪ Mengembangkan materi KIE sesuai sasaran audiens



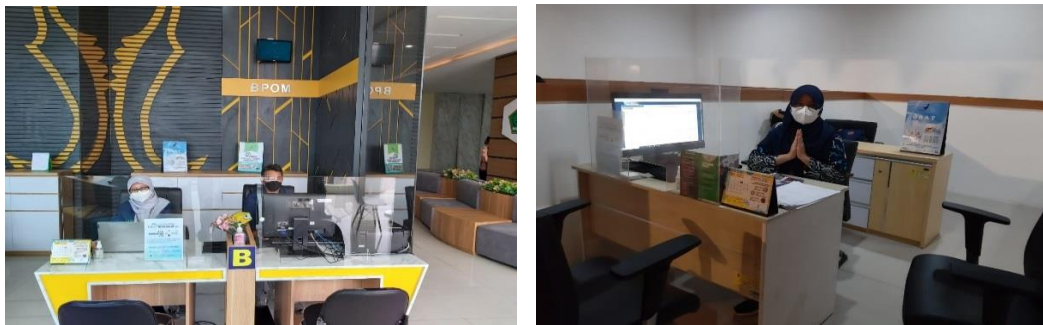
- ☛ Memperluas cakupan KIE dengan cara bekerjasama dengan tokoh masyarakat, bekerjasama dengan lintas sektor terkait.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

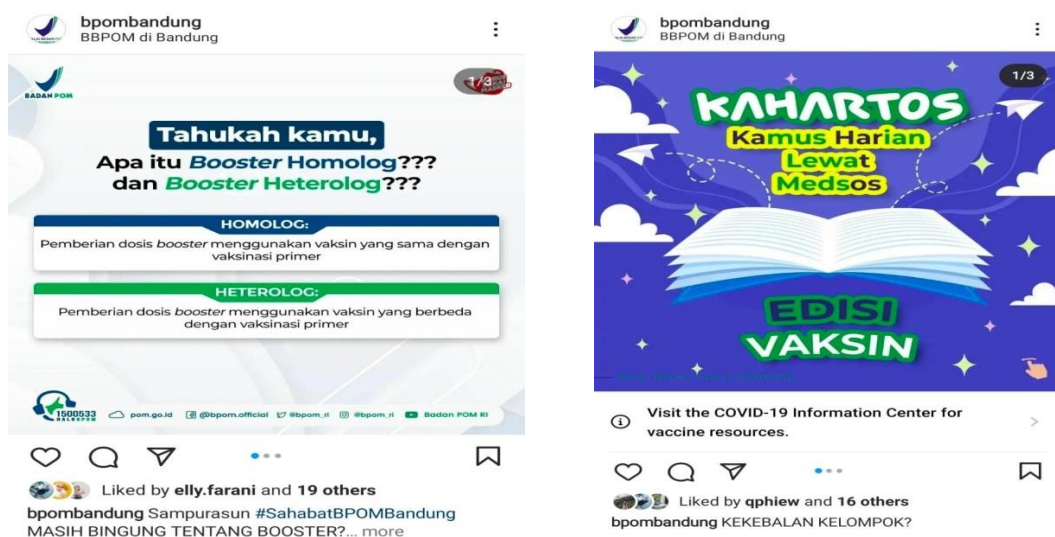
Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yaitu:

1. Melakukan KIE melalui sosial media infografis baik di Facebook maupun Instagram secara konsisten.
2. Program KAHARTOS di Media sosial Program ini berisi definisi dari tiap kata yang ada di peraturan ataupun yang biasa digunakan pada isu terkini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu terkini.
3. Melakukan KIE bekerjasama dengan pihak radio RRI berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
4. Layanan Konsultasi di Mall layanan publik Kab Bandung dan Kota Bekasi
5. Layanan Konsultasi melalui media daring Googlemeet dan chat menggunakan Aplikasi Whasapp

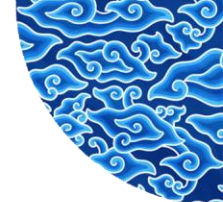


Gambar 3.20 Layanan di Mall Pelayanan Publik



Gambar 3.21 KIE melalui Media Sosial





E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Selain itu, rekomendasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti terkait pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2022 yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- ☰ Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.
- ☰ Melakukan evaluasi dan Analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
- ☰ Melakukan koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi Evaluasi KIE.

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/Lembaga lain
- Melaksanakan KIE melalui Webinar Warta POPA tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas.
- Menjaga Konsistensi kegiatan melalui Media sosial

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Jumlah sekolah dihitung secara kumulatif dari periode tahun 2020.

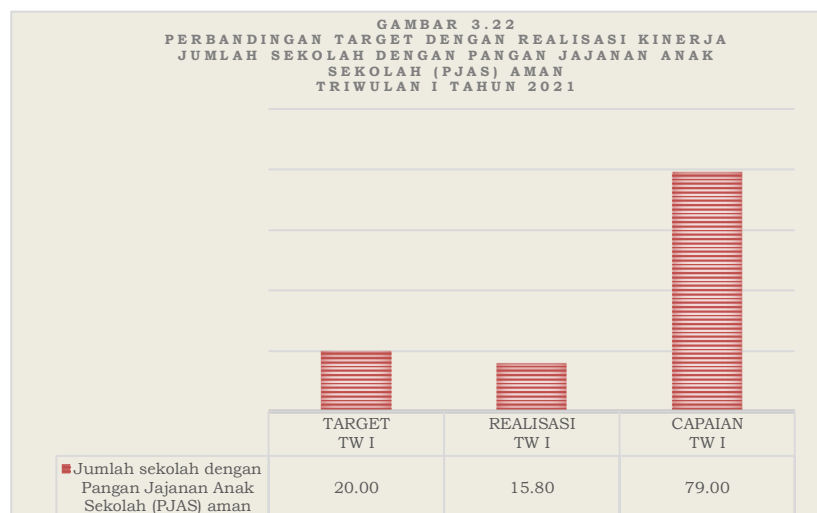


TABEL 3.26
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW 1	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Progress 20%	15.8%	79,00%	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022

Target penetapan kinerja tahun 2022 pada indikator sasaran strategis ini adalah sebanyak 76 sekolah yang terdiri dari sekolah yang sudah diintervensi dari tahun 2020 – 2021 sebanyak 42 sekolah, dan target tahun 2022 sebanyak 34 sekolah, dan untuk target triwulan I tahun 2022 adalah progress 20%, Kegiatan ini dapat dihitung ouputnya pada akhir tahun anggaran jika keseluruhan tahapan telah selesai. Progres pelaksanaan kegiatan PJAS pada triwulan I sebesar **15,80%**. Jika diukur terhadap target triwulan I maka capaiannya sebesar **79,00%** dengan kriteria **Cukup**.



Balai Besar POM di Bandung akan melaksanakan Intervensi PJAS pada tahun 2022 di Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kota Sukabumi dan Banjar. Sampai dengan triwulan I Tahun 2022, BBPOM di Bandung sudah melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan terhadap 34 Sekolah yang ada di Wilayah Kota Banjar.

Intervensi yang dilakukan bertahap sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan POM RI. Tahap kegiatan PJAS yang dilaksanakan adalah Advokasi dengan



lintas sector, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah dan Workshop. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.27
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS
s.d. TRIWULAN I TAHUN 2022**

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	10	0	0	0	10
2 Sosialisasi Keamanan Pangan	10	2.5	0	0	0	2.5
3 Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	0	0	0	0	0
4 Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)	15					
🚩 Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		0	0	0	0	0
🚩 Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		0	0	0	0	0
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20	0	0	0	0	0
7 Pengawalan	10	3.3	0	0	0	3.3
TOTAL SKOR	100	15.8	0	0	0	15.8

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 76 sekolah (progress 20%). Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **79,00%** dengan kriteria **Cukup**.

C. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Progres pelaksanaan kegiatan PJAS belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan I karena:



- ☪ Audiensi sebagai persiapan untuk pelaksanaan Advokasi baru dapat dilaksanakan terhadap 2 Kabupaten/Kota.
- ☪ Pelaksanaan Advokasi sebagai titik awal untuk menggalang komitmen lintas sektor terkait baru dapat dilaksanakan terhadap 2 Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan kegiatan ini pada pertengahan bulan maret menyebabkan kegiatan lanjutan baru dapat dilaksanakan pada akhir maret dan di triwulan selanjutnya.
- ☪ Terjadi perubahan Kabupaten yang akan diintervensi setelah desk dengan Dit. PMPU. Menyebabkan pelaksanaan audiensi terhadap kabupaten baru membutuhkan waktu yang lebih lama
- ☪ Proses audiensi terhadap pemerintah kab. Pangandaran baru sampai tahap penyampaian program ke Buptai dan belum dapat dilaksanakan terhadap dinas terkait.

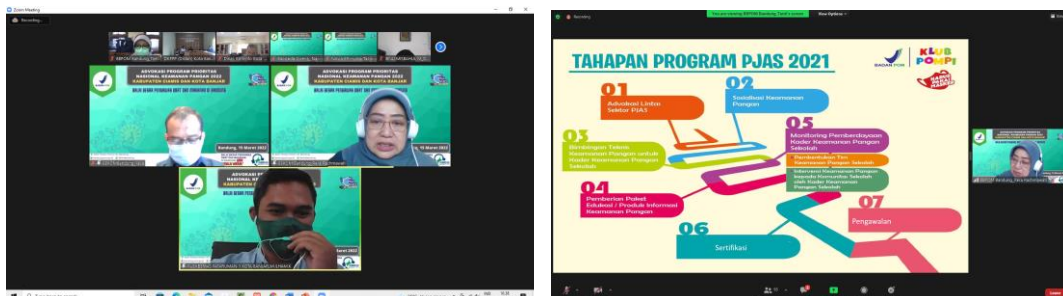
Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☪ Melaksanakan Kegiatan Advokasi terhadap 2 kabupaten kota yang telah siap
- ☪ Melaksanakan Kegiatan pengawalan terhadap sekolah, yang semestinya kegiatan dilakukan di TW III/IV
- ☪ Melakukan percepatan kegiatan terhadap kabupaten yang telah diadvokasi

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I 2022 adalah sebagai berikut:

- ☪ Memajukan Sebagian kegiatan Pengawalan
- ☪ Melakukan kegiatan sosialisasi Keamanan Pangan
- ☪ Merencanakan Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan di Sekolah Pada TW 2



Gambar 3.23
Kegiatan Advokasi dengan lintas Sektor





Gambar 3.24
Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Melaksanakan Kegiatan secara daring menggunakan platform media Zoom Meeting.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

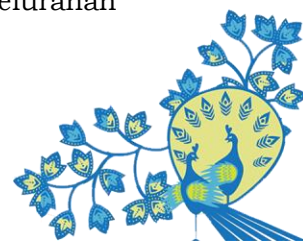
- ☰ Pelaksanaan Advokasi dilakukan secara daring
- ☰ Mempertajam kegiatan Audiensi dengan koordinasi ke kantor bupati/walikota

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

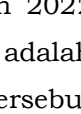
3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1) Advokasi Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawasan. Jumlah desa dihitung secara kumulatif dari desa yang diintervensi pada periode tahun 2020. Desa yang sudah diintervensi pada periode 2020-2021 adalah 19 Desa. Target desa yang diintervensi tahun 2022 adalah 9 Desa yang meliputi 3 Kelurahan di Kota Banjar, 2 Desa di Kab. Ciamis, 1 Desa di Kab. Pangandaran dan 3 Kelurahan di Kota Sukabumi. Desa yang sudah ditetapkan diantaranya Kelurahan

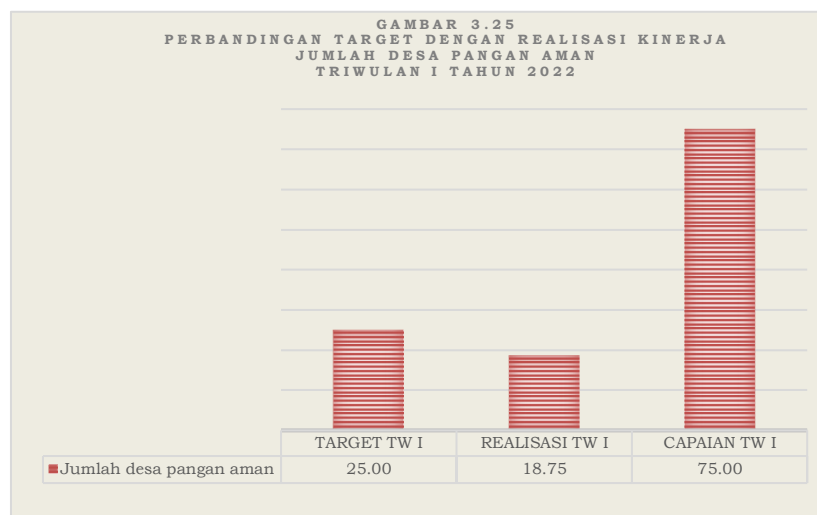


Batulawang, Binangun dan Sukamukti di Kota Banjar, serta Desa Sindangangin dan Panjalu di Kab. Ciamis.

TABEL 3.28
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah desa pangan aman	Progress 25%	Progress 18.75%	75%	Cukup	

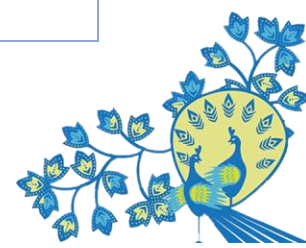
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 28 Desa. Target yang ditetapkan pada Triwulan I tahun 2022 adalah progress 55%. Pada triwulan I, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar progress 18.75%. Jika diukur terhadap target triwulan IV maka capaiannya sebesar **75.00%** dengan kriteria **Cukup**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.29
PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2022

	KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20	10	0	0	0	10
2	Pengadaan Gimmick, rapid test, dll	5	5	0	0	0	5



KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	3.75	0	0	0	3.75
4 Bimtek Komunitas	15	0	0	0	0	0
5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10	0	0	0	0	0
7 Monitoring dan Evaluasi	10	0	0	0	0	0
8 Lomba Desa Pangan Aman	5	0	0	0	0	0
9 Pengawasan	10	0	0	0	0	0
TOTAL SKOR	100	18.75	0	0	0	18.75

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I DENGAN TARGET TAHUN 2022

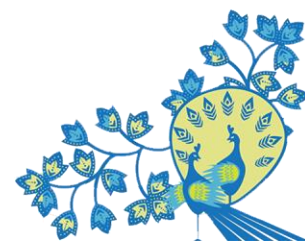
Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 28 desa (progress 55%). Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **75.00%** dengan kriteria **Cukup**.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Progres pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan I karena:

- ☪ Audiensi sebagai persiapan untuk pelaksanaan Advokasi baru dapat dilaksanakan terhadap 2 Kabupaten/Kota.
- ☪ Pelaksanaan Advokasi sebagai titik awal untuk menggalang komitmen lintas sektor terkait baru dapat dilaksanakan terhadap 2 Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan kegiatan ini pada pertengahan bulan maret menyebabkan kegiatan lanjutan baru dapat dilaksanakan pada akhir maret dan di triwulan selanjutnya.
- ☪ Terjadi perubahan Kabupaten yang akan diintervensi setelah desk dengan Dit. PMPU. Menyebabkan pelaksanaan audiensi terhadap kabupaten baru membutuhkan waktu yang lebih lama
- ☪ Proses audiensi terhadap pemerintah kab. Pangandaran baru sampai tahap penyampaian program ke Bupati dan belum dapat dilaksanakan terhadap dinas terkait.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

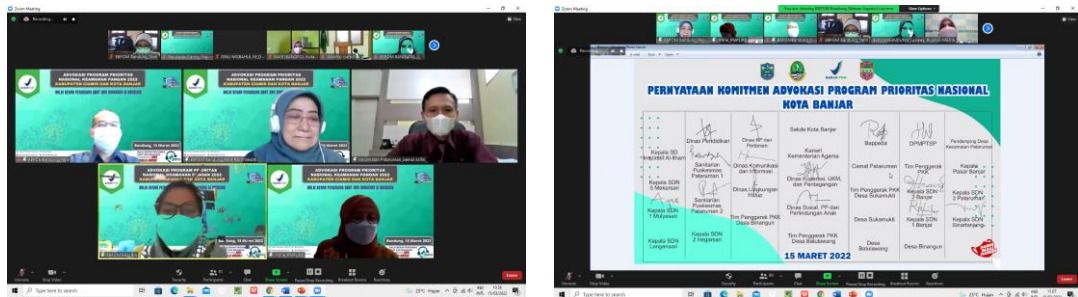


- ☪ Melaksanakan Kegiatan Advokasi terhadap 2 kabupaten kota yang telah siap.
- ☪ Melakukan percepatan kegiatan terhadap kabupaten yang telah diadvokasi.

**D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- ☪ Audiensi dan Advokasi keamanan pangan lintas sektor terhadap 2 kabupaten/Kota
- ☪ Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa terhadap 3 Kelurahan di Kota Banjar



Gambar 3.26 Advokasi Keamanan Pangan dengan Lintas Sektor



Gambar 3.27 Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa Kelurahan Banjar

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut Kegiatan yang dilakukan:

- ☪ Melakukan intervensi terhadap 2 kabupaten yang telah diadvokasi.
- ☪ Mempercepat pelaksanaan audiensi terhadap 2 kabupaten/kota lain.
- ☪ Melanjutkan tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman di TW II

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA




Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

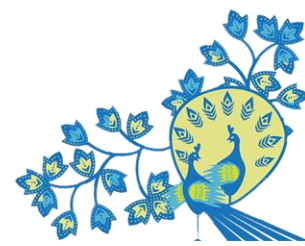
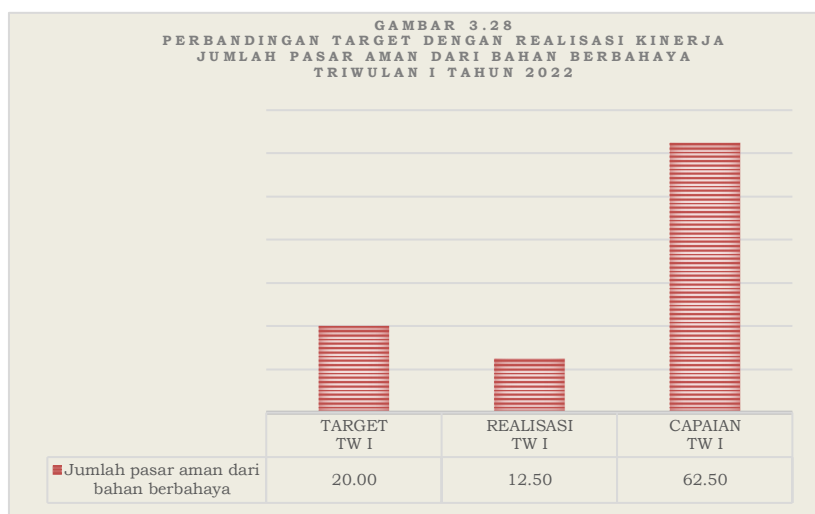
4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Jumlah output target pasar merupakan jumlah kumulatif dari pasar yang diintervensi sejak tahun 2020. Pasar yang sudah diintervensi dari tahun 2020- 2021 sebanyak 8 pasar, target tahun ini sebanyak 5 pasar. Pasar yang di rencanakan di intervensi pada tahun 2022, adalah Pasar Degung dan Lembursitu di Kota Sukabumi, Pasar Kawali di Kabupaten Ciamis, Pasar Banjar serta 1 pasar di Kab. Pangandaran belum ditetapkan

**TABEL 3.30
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13 Pasar Progress 20%	12.5%	62.5%	Kurang	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2022 adalah 13 pasar. Target yang ditetapkan pada TW I tahun 2022 adalah progress 25%. Pada triwulan I, realisasi indikator sasaran kegiatan tersebut sebesar 13 Pasar dengan progress 12,5. Jika diukur terhadap target triwulan IV maka capaiannya sebesar **62.5%** dengan kriteria **Kurang**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.31
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR AMAN
DARI BAHAN BERBAHAYA
SD TRIWULAN I TAHUN 2022**

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Advokasi	20	10	0	0	0	10
2 Survey Pasar	5	2.50	0	0	0	2.50
3 Bimtek Pengelola Pasar	15	0	0	0	0	0
4 Sampling dan Pengujian Tahap I	15	0	0	0	0	0
5 Penyuluhan	10	0	0	0	0	0
6 Kampanye	10	0	0	0	0	0
7 Sampling dan Pengujian Tahap II	15	0	0	0	0	0
8 Pengawasan	10	0	0	0	0	0
TOTAL SKOR	100	12.50	0	0	0	12.50

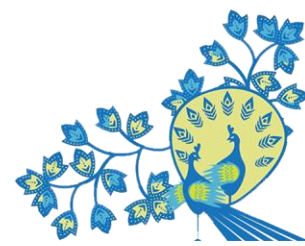
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 13 Pasar (progress 100%). Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **62.5%** dengan kriteria **Kurang**.

C. ANALISIS KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Progres pelaksanaan kegiatan Pasar Aman belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan I karena:

- ☹️ Audiensi sebagai persiapan untuk pelaksanaan Advokasi baru dapat dilaksanakan terhadap 2 Kabupaten/Kota.
- ☹️ Pelaksanaan Advokasi sebagai titik awal untuk menggalang komitmen lintas sektor terkait baru dapat dilaksanakan terhadap 2 Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kegiatan ini pada pertengahan bulan Maret menyebabkan kegiatan lanjutan baru dapat dilaksanakan pada akhir Maret dan di triwulan selanjutnya.



- ☪ Terjadi perubahan Kabupaten yang akan diintervensi setelah desk dengan Dit. PMPU. Menyebabkan pelaksanaan audiensi terhadap kabupaten baru membutuhkan waktu yang lebih lama
- ☪ Proses audiensi terhadap pemerintah kab. Pangandaran baru sampai tahap penyampaian program ke Bupati dan belum dapat dilaksanakan terhadap dinas terkait.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☪ Melaksanakan Kegiatan Advokasi terhadap 2 kabupaten kota yang telah siap.
- ☪ Melakukan percepatan kegiatan terhadap kabupaten yang telah diadvokasi.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- ☪ Audiensi dan Advokasi keamanan pangan lintas sektor terhadap 2 kabupaten/Kota
- ☪ Survey Pasar Banjar di Kota Banjar dan Pasar Kawali di Kab. Ciamis



Gambar 3.29 Kegiatan Survey Pasar di Kota Banjar



Gambar 3.30 Kegiatan Survey Pasar di Kab. Ciamis

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut Kegiatan yang dilakukan:

- ☪ Melakukan intervensi terhadap Pasar di 2 kabupaten yang telah diadvokasi.
- ☪ Mempercepat pelaksanaan audiensi terhadap 2 kabupaten/kota lain.



☪ Melanjutkan tahapan Kegiatan Pasar Aman di TW II

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA




Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-6**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN
PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

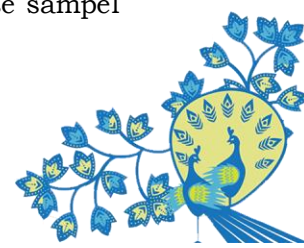
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun. Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **190,00%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.32
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	10,00%	17,09%	170,90%	Tidak dapat disimpulkan	
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	10,00%	20,91%	209,10%	Tidak dapat disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			190,00%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	

1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR


Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel



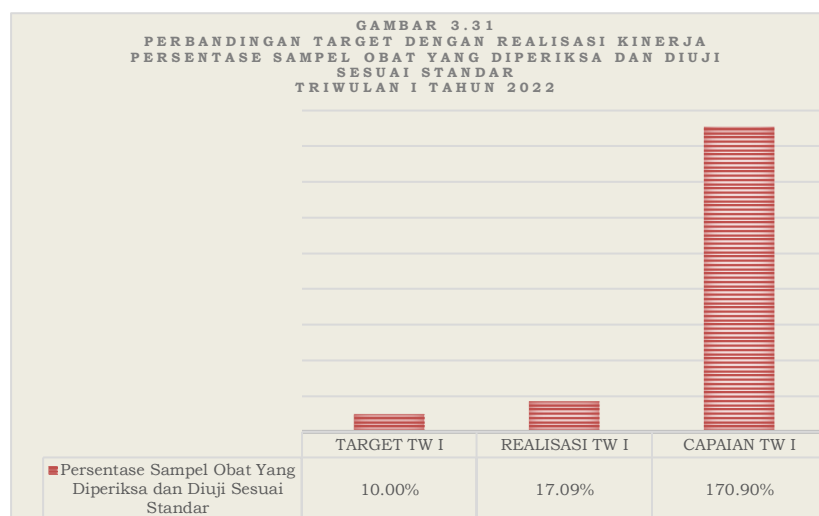
Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

**TABEL 3.33
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

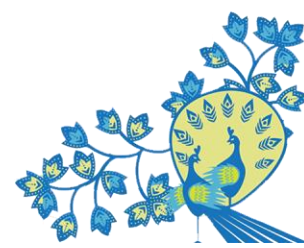
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	10,00%	17,09%	170,90%	Tidak Dapat Disimpulkan 

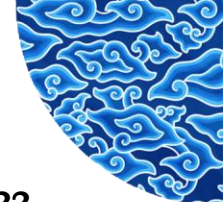
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I, jumlah sampel obat yang disampling 555 sampel dan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 3486 sampel. Dari data tersebut, diperoleh nilai

persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 17,09%. Target pada triwulan I yang telah ditetapkan sebesar 10,00%, dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **170,09%** dengan Kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.





B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 17,09%.

C. ANALISIS KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian pada triwulan I tahun 2022 ini disebabkan oleh:

- ☛ Adanya regionalisasi laboratorium menyebabkan perbedaan realisasi dengan target yang sebelumnya ditetapkan. Sehingga target triwulanan harus direview kembali.
- ☛ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 25,00% dan realisasinya sebesar 20,87% (555 sampel dari 2659 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan pada triwulan I adalah 10,00% dan realisasinya mencapai 13,31% (464 sampel dari 3486 sampel yang diuji). Sehingga target triwulan I untuk indikator kinerja ini seharusnya 17,50%.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022, antara lain:

- ☛ Review target triwulan untuk indikator kinerja ini.
- ☛ Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- ☛ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☛ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☛ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain :



- ☸ Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.
- ☸ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Sampai dengan triwulan I tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1) Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022.
- ☸ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

- ☸ Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.
- ☸ Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 masih terkendala pandemic Covid-19, sehingga masih dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target triwulan I tahun 2022 dapat tercapai. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.
- ☸ Telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil kimia pangan melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1). 1) Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia.



- ☛ Telah dilakukan peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

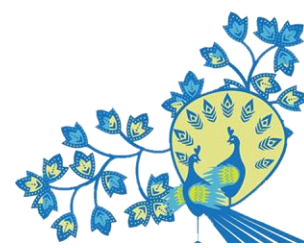
2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

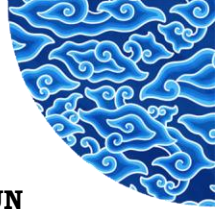
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

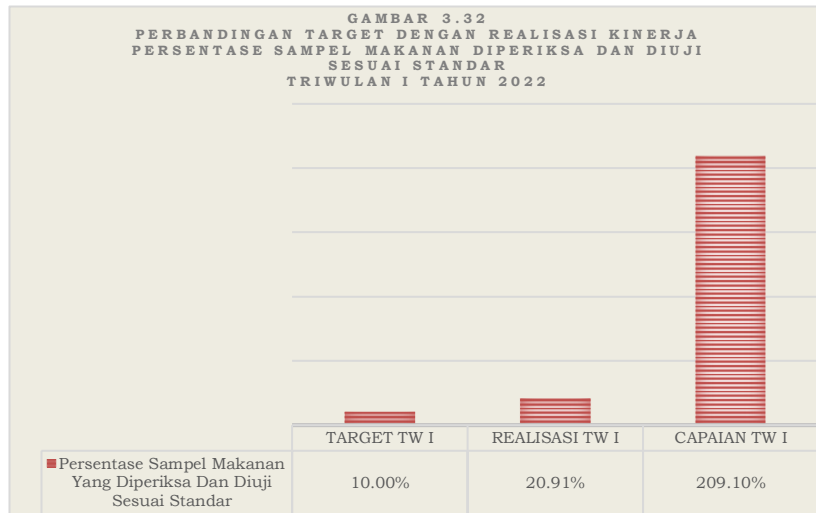
**TABEL 3.34
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	10,00%	20,91	209,10%	Tidak Dapat Disimpulkan 





A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 10,00%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada

triwulan I tahun 2022 sebesar 20,91% dengan rincian jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 28,24% (sebanyak 327 sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan yang diperiksa sebanyak 1158 sampel) dan jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 13,58% (sebanyak 233 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1716 sampel). Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **209,10 %** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target triwulan I tahun 2022 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 20,91%.

C. ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kebhasilan pencapaian pada triwulan I tahun 2022 ini disebabkan oleh:

- ☛ Adanya regionalisasi laboratorium menyebabkan perbedaan realisasi dengan target yang sebelumnya ditetapkan. Sehingga target triwulanan harus direview kembali.
- ☛ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 25,00% dan realisasinya sebesar 28,24% (327 sampel dari 1158 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan pada triwulan I adalah 10,00% dan realisasinya mencapai 13,58% (233 sampel dari 1716



sampel yang diuji). Sehingga target triwulan I untuk indikator kinerja ini seharusnya 17,50%.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2022, antara lain :

- ☪ Review target triwulan untuk indikator kinerja ini
- ☪ Koordinasi sampling yang melibatkan fungsi pemeriksaan, Koordinator regionalisasi region 3 (BBPOM di DKI Jakarta) dan fungsi pengujian yang lebih baik, sehingga pemecahan permasalahan atau kendala yang terjadi pada saat proses sampling di lapangan dapat berjalan optimal.
- ☪ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☪ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☪ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Makanan meningkat.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- ☪ Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji validasi dan verifikasi metode analisa.
- ☪ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial. Sampai dengan triwulan I tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil kimia pangan melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1) Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022.



- ☪ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Koordinator yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi tersebut :

- ☪ Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.
- ☪ Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 masih terkendala pandemic Covid-19, sehingga masih dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target triwulan I tahun 2022 dapat tercapai. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.
- ☪ Telah dilakukan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis personil kimia pangan melalui pelatihan dan webinar, yaitu 1). Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022. Dengan adanya pelatihan dan webinar ini meningkatkan pengetahuan dari personel penguji kimia pangan.
- ☪ Telah dilakukan peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel makanan maupun pengujian makanan sehingga pemeriksaan dan pengujian makanan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.





**SASARAN
KEGIATAN
KE-7**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN
KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH
KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **75,82%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.36.

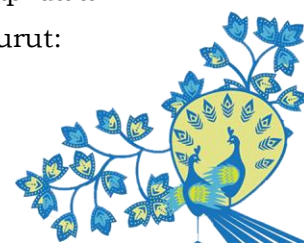
**TABEL 3.36
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7
TRIWULAN I TAHUN 2022**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	28,00%	21,23%	75,82%	Cukup	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			75,82%	CUKUP	

**PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI
BIDANG OBAT DAN MAKANAN**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

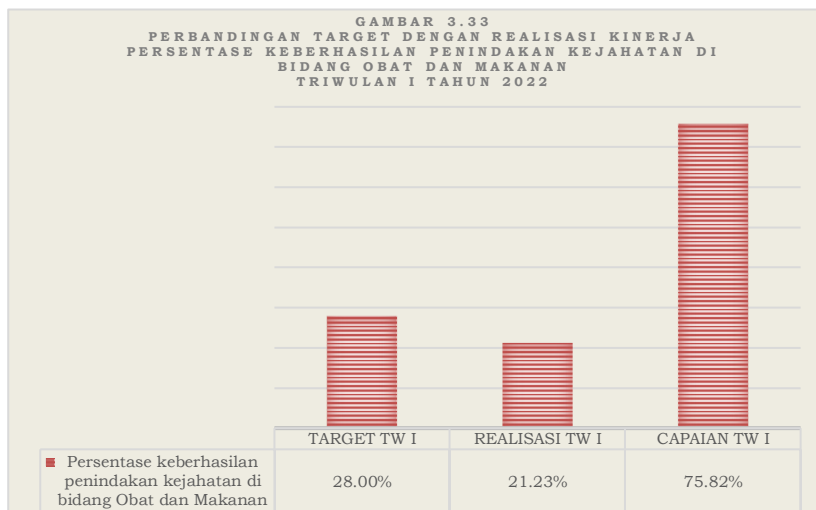


- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 28,00%.

Realisasi kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7

sebesar 21,23% sehingga capaian indikator sasaran kegiatan ke-7 sebesar **75,82%** dengan kriteria **Cukup**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAS KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan/penurunan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2021 disebabkan antara lain:

Penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☪ Adanya perubahan modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang semakin berkembang antara lain: maraknya penjualan produk ilegal secara online, banyaknya jumlah sarana produksi dan sarana distribusi, jam operasional yang tidak menentu/acak menyebabkan banyaknya operasi penindakan yang dilakukan tidak berhasil karena tutup, berpindah tempat dan tidak menemukan alat bukti yang cukup.
- ☪ Dalam beberapa kegiatan investigasi, hasil kegiatan investigasi tidak cukup dalam pengumpulan bahan keterangan bahkan hasil investigasi tidak ada karena kegiatannya telah diketahui oleh target.
- ☪ Dalam salahsatu kegiatan operasi penindakan tidak berhasil dilakukan karena hasil kegiatan investigasi tidak maksimal dalam mengungkap dugaan



tindak pidana bidang obat dan makanan akibat dari beberapa kegiatan investigasi telah diketahui oleh target.

- ☪ Wabah/pandemic *Corona* menghambat proses rantai kegiatan bidang penindakan yang seharusnya berkesinambungan dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi, operasi penindakan dan proses pemberkasan karena beberapa petugas pernah terkena Covid-15 sehingga perlu dilakukan isoman pada semua petugas di Kelompok substansi penindakan.
- ☪ Penggantian pejabat struktural di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar menyebabkan perubahan kebijakan dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis yang menghambat kegiatan operasi penindakan dan proses pemberkasan

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☪ Melakukan sistem komunikasi terbatas dalam penentuan target investigasi dan operasi penindakan serta melakukan rotasi atau penggantian terhadap petugas yang bertugas dalam pembuatan surat perintah tugas investigasi dan surat perintah operasi penindakan
- ☪ Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui infokom dan diteruskan ke kelompok substansi penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
- ☪ Membangun jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah Jawa Barat
- ☪ Melakukan koordinasi kembali dengan pejabat struktural di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar untuk membuat kesepakatan dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis sehingga dapat menunjang kegiatan operasi penindakan dan proses pemberkasan
- ☪ Melakukan koordinasi dengan Direktorat Intelijen BPOM dan pihak terkait lain mengenai tindak lanjut dari Patroli Siber yg sudah dilakukan agar dapat mengungkap informasi penjualan produk ilegal secara *online*.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-7, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja



BBPOM di Bandung” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

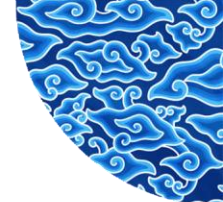
☛ Penyidikan Obat dan Makanan

Pada Triwulan 1 tahun 2022, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 3 perkara yang dilakukan proses projusticia. Selain itu, ada 1 kasus yang berdasarkan hasil rapat gelar perkara tidak ditindaklanjuti proses projusticia. Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara pro justicia berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 3 perkara yg ditangani Bidang Penindakan terdiri dari 1 perkara distribusi obat tradisional tanpa ijin edar di Wilayah Kota Bandung, 1 perkara produksi pangan dengan tambahan bahan yang dilarang yaitu Tahu Formalin di Wilayah Kabupaten Bogor, dan 1 perkara distribusi dan produksi (repack) kosmetik tanpa ijin edar di Wilayah Kota Bandung. Proses penyidikan atas 3 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan masih berlanjut dan diharapkan dapat selesai tahap 2 di tahun berjalan.



Gambar 3.34 Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan





🕌 Investigasi Awal

Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online. Kegiatan investigasi awal yang dilakukan pada triwulan 1 tahun 2022 terhadap 12 sarana, namun hanya 6 sarana yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Dari jumlah tersebut, 4 sarana ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan dengan output kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 4 kasus, terdiri dari 3 kasus Pro-justitia ditangani Balai Besar POM di Bandung, dan 1 kasus non Pro-justitia.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Rekomendasi untuk pencapaian sasaran ini pada tahun sebelumnya dan rekomendasi tahun 2022 bertumpu pada peningkatan kualitas SDM terkait penyidikan obat dan makanan serta peningkatan koordinasi lintas sektor khususnya dengan *Criminal Justice System (CJS)*.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan 1 tahun 2022 terhadap rekomendasi yang telah diberikan antara lain:

- 🕌 Peningkatan kompetensi SDM baik dari segi kompetensi teknis ataupun manajerial yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Bandung. Penunjukan peserta disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi staf untuk memperkecil perbedaan/gap kompetensi masing-masing individu. Beberapa kegiatan peningkatan kompetensi SDM yg sudah dilaksanakan di Triwulan 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Pelatihan dan Sosialisasi serta GAP ANALYSIS ISO 37001	21-02-2022	<ul style="list-style-type: none"> - Alex Sander, S.Farm Apt., MH - Ayi Mahpud Sidik, S.Si., Apt., MH - Lintang Kusumawardhani, SH - Tegar Setya Dharma, SH



No	Kegiatan	Waktu	Peserta
2	Pelatihan dan Sosialisasi 37001	23-02-2022	- Seluruh Pegawai Kelompok Substansi Penindakan
3	Sosialisasi Format RHPK dan capaian RAPK UPT Tahun 2022	24-03-2022	- Lintang Kusumawardhani, SH

Selain kegiatan diatas, ada beberapa kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan mulai dari Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.

- ✎ Peningkatan koordinasi lintas sektor pada saat akan, selama dan setelah proses penindakan dilaksanakan secara intensif terutama dengan Korwas PPNS POLDA Jabar dan Jaksa Penuntut Umum, baik untuk percepatan penyelesaian berkas perkara ataupun dalamantisipasi untuk menghindari adanya pra peradilan perkara yang ditangani penyidik Balai Besar POM di Bandung.
- ✎ Peningkatan koordinasi dengan Kejati Jabar selain dalam proses pemberkasan juga melibatkan instansi tersebut dalam kegiatan operasi penindakan untuk membantu penyamaan pemahaman dalam kegiatan pemberkasan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Bandung.
- ✎ Peningkatan koordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Jabar dalam kegiatan operasi penindakan guna menunjang bantuan teknis penindakan selain yang dilakukan oleh Korwas Polda Jabar
- ✎ Pelaksanaan “Pertemuan Peningkatan Koordinasi dan Sinergisme Dalam Rangka Integrated Criminal Justice System (ICJS)” yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III atau IV tahun 2022

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

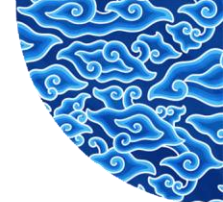
Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

SASARAN KEGIATAN KE-8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran. Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:





1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Manajemen Perubahan: bobot 5%; (2) Penataan Tatalaksana: bobot 5%; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; (5). Penguatan Pengawasan: bobot 15%; dan (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

2. INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-9**

**TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG
BERKINERJA OPTIMAL**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran.

INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.

Pengukuran IP-ASN tahun 2022 diukur pada akhir Triwulan IV menggunakan aplikasi <https://siasn.pom.go.id/sirensdm/ip-asn>. Namn demikian, berbagai kegiatan tetap dilaksanakan pada Triwulan I untuk meningkatkan realisasi kinerja, antara lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:**
Usulan calon peserta tugas belajar dan ijin belajar batch 1 Tahun 2022 ke PPSDM; Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar secara berkala.
- **Kompetensi:**
Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai Pejabat Fungsional PFM; dan Pemetaan Kompetensi Pejabat Fungsional PFM
- **Kinerja:**



Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya capaian SKP TW4 tahun 2021; Penyusunan Matriks Peran Hasil, dan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2022 menggunakan aplikasi SIMAKIN

- **Disiplin:**

Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala

Diharapkan proses pencapaian kinerja pada akhir tahun sesuai target, dan proses keberhasilan di TW1 dipengaruhi berbagai faktor, antara lain:

- **Kualifikasi Pendidikan:**

BBPOM di Bandung memfasilitasi peserta Tugas Belajar serta Ijin Belajar untuk meningkatkan kualifikasi Pendidikan. Pada tahun 2022 terdapat sejumlah 7 Pegawai sedang menjalani Tugas Belajar dan 2 pegawai Ijin Belajar.

- **Kompetensi:**

Pemenuhan persyaratan target SKP Pengembangan Kompetensi 20 JP untuk seluruh pegawai sangat berpengaruh dalam peningkatan kompetensi. Selain itu, program Uji Kompetensi untuk Pejabat Fungsional, terutama PFM, juga berpengaruh dalam peningkatan Kompetensi Pegawai

- **Kinerja:**

Capaian Kinerja seluruh Pegawai seluruhnya baik berdasarkan Penilaian atasan langsung, sangat dipengaruhi kompetensi manajerial masing-masing atasan

- **Disiplin:**

Pencegahan Pelanggaran Disiplin, melalui sosialisasi Peraturan Disiplin berperan dalam pemahaman dan pelaksanaan Disiplin Pegawai BBPOM di Bandung

Tindak Lanjut terhadap capaian Indeks Profesionalitas ASN adalah mempertahankan dan meneruskan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, serta mengembangkan kegiatan penunjang lainnya seperti Peningkatan Kompetensi untuk Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional PFM.

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.





**SASARAN
KEGIATAN
KE-10**

**MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Namun pada triwulan I, yang diukur hanya Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal. Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **80,89%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.43.

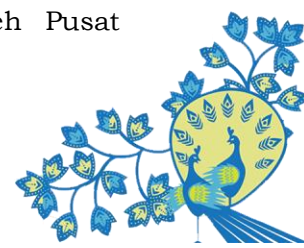
TABEL 3.36
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,00%	-	-	Diukur pada akhir tahun	
2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,25	1,82	80,89%	Cukup	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			80,89%	CUKUP	

**1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR
GLP**

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat



Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)
Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.
2. Penilaian Standar Kompetensi
Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.
 - ☰ Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).
 - ☰ Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
 - ☰ Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.
3. Penilaian Standar Peralatan
 - ☰ Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
 - ☰ Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
 - ☰ Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Pada triwulan I, belum dilakukan pengukuran terhadap realisasi kinerja indikator sasaran ini, karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun anggaran 2022. Sampai dengan triwulan I pemenuhan SKL yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Standar Ruang Lingkup: Penambahan kemampuan uji laboratorium kimia obat (penambahan 1 ruang lingkup) dan laboratorium kimia kosmetik (penambahan 1 ruang lingkup).
- 2) Peningkatan Standar Kompetensi: kegiatan bimbingan teknis dan webinar terkait teknis laboratorium untuk meningkatkan pengetahuan personil pengujian, antara lain yaitu 1). Statistik untuk Evaluasi Uji Profisiensi



sesuai ISO 13528:2015 tanggal 11 Januari 2022; 2). Statistik yang digunakan dalam Pembuatan Bahan Acuan (Reference Material) tanggal 9 Maret 2022; 3). Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan tanggal 29-30 Maret 2022.


- 3) Peningkatan Standar Alat Laboratorium: Pada triwulan I telah dibuat rencana pemenuhan penambahan beberapa alat laboratorium untuk meningkatkan alat laboratorium sesuai standar GLP. Pada substansi Pengujian Kimia, terdapat penambahan sebanyak 3 alat, yaitu Microwave Digester, Disolution Tester, dan Karl Fischer. Pada substansi Pengujian Mikrobiologi ada penambahan sebanyak 4 alat, yaitu Biosafety Cabinet Class II Tipe A2; Incubator, pH Meter dan Particle Counter.

2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

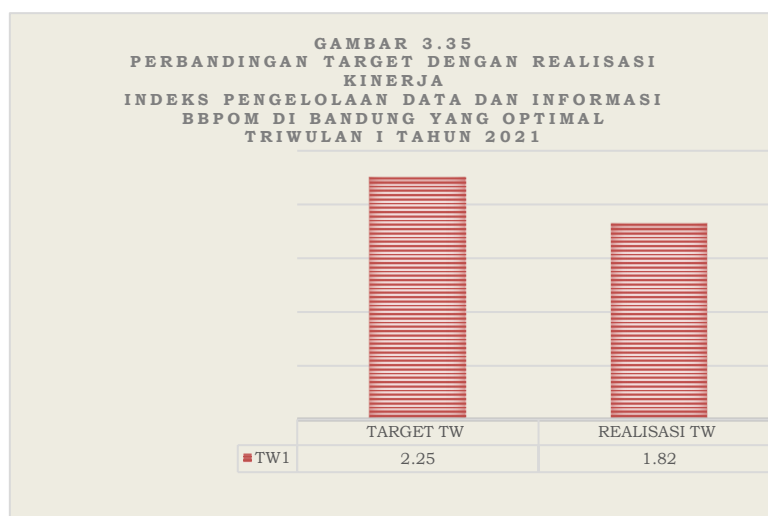
Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM Operational Centre (BOC). Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.



TABEL 3.37
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”
TRIWULAN I TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2,25	1,82	80,89%	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 2,25 sedangkan realisasinya sebesar 1,82. Dengan rincian, pada komponen Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi

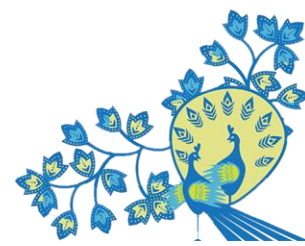
sebesar 2,25 dan komponen Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan sebesar 1,4. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **80,89 %** dengan kriteria **Cukup**.

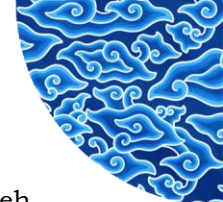
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022 DENGAN TARGET TAHUN 2022

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 2,25 (dua koma dua lima). Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan I sebesar 80,89 %.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERBERHASILAN/KEGAGALAN ATAS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab kecenderungan penurunan kinerja pada triwulan I tahun 2022, sebagai berikut:





- ☛ Pemanfaatan email: Masih belum optimal pemanfaatan email corporate oleh pegawai pada TW I, yaitu rata-rata 79.26 %, seperti tampak dari tabel berikut:

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email			
	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
total_akun_individu	146	147	150
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_aktif	85	102	103
total_individu_login	85	102	103
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	17,47	20,82	20,6
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	17,47	20,82	20,6
Perhitungan (%)	74,94	81,64	81,2
Perhitungan per TW	79,26		
Nilai Indeks	2		

Hal tersebut disebabkan, pegawai lebih banyak menggunakan akses email gmail untuk akses komunikasi dan belum ada manfaat tambahan untuk penggunaan fitur email corporate. Selain itu, dilaporkan masih banyak pegawai lupa password email corporate.

- ☛ Akses BOC dan Login BOC: Pada TW I akses dan login BOC dilaksanakan secara rutin dan berkala sehingga indeks pemanfaatan maksimal yaitu 3 (tiga).
- ☛ Akses Sharing Folder: Pada TW I ada kecenderungan peningkatan akses sharing folder rata-rata 56,67 dengan Indeks 2 (dua), sebagian besar akses shared folder adalah untuk download label produk e-Registration Pangan Olahan.

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder			
Aktifitas	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
Jumlah Akses	44	53	73
Perhitungan	56,67		
Nilai Indeks	2		

- ☛ Berita Aktual: Pada TW I ada kecenderungan peningkatan jumlah viewer berita aktual menjadi 3.874 viewer, dengan jumlah berita yang diunggah cukup banyak yaitu 13 berita. Peran penting tim media sosial untuk pemanfaatan subsite bandung.pom.go.id serta sosialisasi serta informasi di media sosial masih perlu terus ditingkatkan untuk lebih optimalnya akses subsite tersebut.



Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual	
	TW I
Jumlah Upload	13
Jumlah Viewer	3874
Perhitungan Rata2 Berita	4,33
Perhitungan Rata2 Pengunjung	298
Indeks Per TW	3

- ☛ SPIMKER dan SIPT: Secara umum untuk SPIMKER dan SIPT telah dilaksanakan dengan baik pada TW I; Untuk SPIMKER pemanfaatan cukup tinggi, yaitu 99.52% dengan indeks komposit maksimal 0,6; namun untuk SIPT pada TW I, pemanfaatan hanya mencapai 65,57% dengan indeks komposit 0,8 (dari maksimal 2,4).

Tindak lanjut yang telah dilakukan:

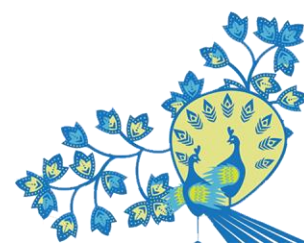
- ☛ Pemanfaatan email: Sosialisasi berkala pemanfaatan email kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas; Integrasi Lembar Potongan Gaji yang dikirimkan melalui email; Koneksi aplikasi internal dengan akun email corporate seluruh pegawai; serta akses wajib aplikasi mySAPK menggunakan email corporate
- ☛ Akses BOC dan Login BOC: Tertib administrasi akses dan login BOC, serta update data secara berkala sesuai oleh PIC tim TIK
- ☛ Sosialisasi Shared Folder, akses Berita Aktual oleh seluruh pegawai ditingkatkan.
- ☛ Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian input SIPT serta diharapkan ada peningkatan nilai Indeks setelah launching dan sosialisasi SIPT versi 2022 selesai dilaksanakan akhir April 2022.

E. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA SEBELUMNYA

- ☛ Peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN untuk optimalisasi SIPT serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung untuk optimalisasi email corporate semakin ditingkatkan dengan monitoring perbulan.
- ☛ Peningkatan monitoring terhadap akses dan pemanfaatan koneksi BOC dan shared folder oleh penanggungjawab TIK dilaksanakan perbulan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.





**SASARAN
KEGIATAN
KE-11**

**TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG
SECARA AKUNTABEL**

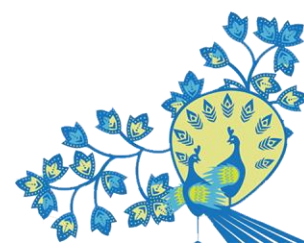
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **219,75%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.38.

**TABEL 3.38
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11
TRIWULAN I TAHUN 2022**

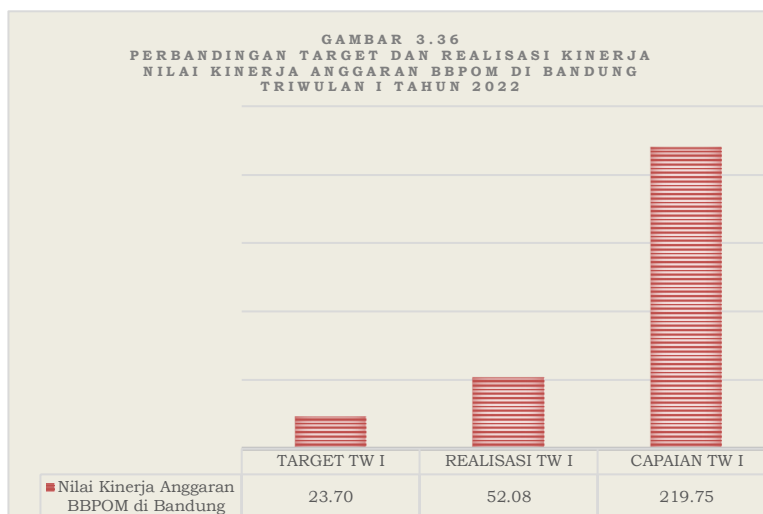
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	23,70	52,08	219,75%	Tidak Dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			219,75%	Tidak Dapat Disimpulkan	

NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022



Pada triwulan I tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 23,70. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung triwulan I tahun 2022 sebesar 52,08, dengan rincian, nilai EKA sebesar 41,91 dan nilai IKPA

sebesar 64,29. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **219,75%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

GAMBAR 3.37
“NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN I TAHUN 2022



TABEL 3.39
“NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
BBPOM DI BANDUNG”
TRIWULAN I TAHUN 2022



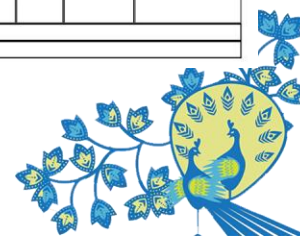
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

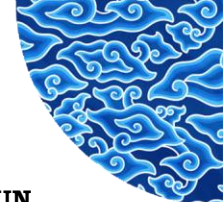
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	095	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	100.00	72.96	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	45.00	70%	64.29
				Bobot	0	10	0	10	10	5	25				
				Nilai Akhir	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00				
				Nilai Aspek	100.00					100.00					

Disclaimer:
Sesuai Perdirjen PerbendahraPER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022





B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I DENGAN TARGET TAHUN 2021

Pada Tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,30. Jika nilai pencapaian sasaran pada triwulan I terhadap target tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada triwulan 1 (53,37%).

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Meningkatnya capaian rincian output, salah satu penyebabnya adalah kebijakan penerapan PPKM Darurat Jawa Bali Level 3 dan 2 di wilayah kerja BBPOM di Bandung, sehingga sebagian besar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Sehingga realisasi dari seluruh rincian output mencapai target yang telah ditetapkan dan terdapat 3 (tiga) rincian output yang telah terealisasi 100% yaitu: Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi.
- ☰ Serapan anggaran BBPOM di Bandung pada triwulan I tahun 2022 sebesar Rp.57.361.818.000,- terhadap pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp.13.237.511.413,- (23,08%).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap rincian output dan sasaran kegiatan setiap bulan.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan melakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya secara luring menjadi daring atau hybrid. Serta percepatan pengadaan barang dan jasa yang sudah dimulai pada Bulan Desember 2021.
- ☰ Peningkatan kinerja pengelolaan APBN pada satker BBPOM di Bandung, antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- ☰ Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di



Bandung yang dihadiri oleh Tim Manajemen Kinerja yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran serta merumuskan rencana tindaklanjut untuk kegiatan bulan berikutnya.



Gambar 3.38
Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

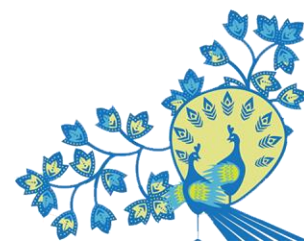
F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- ☪ Melakukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh indikator pembentuk EKA dan IKPA.
- ☪ Menyusun *Plan of Action* (POA) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2022 agar dapat mencapai target capaian kinerja sesuai dengan RAPK Tahun 2022 dan target serapan anggaran sesuai Surat Edaran Nomor: HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- ☪ Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk memenuhi indikator pembentuk EKA dan IKPA antara lain: penyampaian laporan capaian output tepat waktu, pertanggungjawab UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.
- ☪ Telah dilakukan penyusunan *Plan of Action* (POA) Kegiatan berdasarkan DIPA dan POK Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD), dan pada triwulan I telah dilakukan Revisi Anggaran di Kanwil DJPB salah satunya melakukan revisi Halaman III DIPA.
- ☪ Percepatan proses pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 yang sudah dimulai pada tahun anggaran sebelumnya.



- ☰ Menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang diselenggarakan setiap bulan untuk menetapkan tindaklanjut yang dilakukan pada bulan berikutnya.
- ☰ Upaya percepatan penyampaian dokumen/pertanggungjawaban keuangan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode selanjutnya adalah:

- ☰ Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART DJA secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- ☰ Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
- ☰ Memastikan penyerapan anggaran triwulan sesuai dengan target (15%-40%-60%-99%) dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal.
- ☰ Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
- ☰ Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.
- ☰ Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
- ☰ Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan.
- ☰ Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- ☰ Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
- ☰ Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
- ☰ Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
- ☰ Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 57.361.818.000,- dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.257.850.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.595.745.000,-. Pada triwulan I tahun 2022, realisasi anggaran sebesar Rp. 13.237.511.413,- (23.08%).

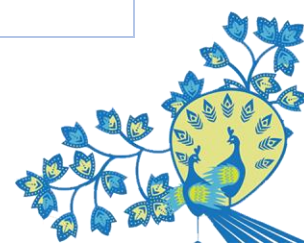
TABEL 3.40
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	32.257.850.000,-	7.302.221.512,-	22.64
Program Dukungan Manajemen	25.023.968.000,-	5.935.289.901,-	23.72
TOTAL	57.361.818.000,-	13.237.511.413,-	23.08

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.41
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,854,663,000,-	46,451,439,-	2.50
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	40,385,000,-	3,000,000,-	7.43
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	260,122,500,-	9,280,000,-	3.57
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	3,956,738,500,-	449,355,100,-	11.36
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10,938,724,000,-	389,976,378,-	3.57



NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	875,477,000,-	202,135,363,-	23.09
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,367,407,000,-	224,533,721,-	16.42
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4,606,359,000,-	622,585,412,-	13.52
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	23,470,695,000,-	5,972,048,284,-	25.44
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9,678,295,00,-	5,264,372,480,-	54.39
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	312,952,000,-	39,662,000,-	12.67
TOTAL		57.361.818.000,-	13.237.511.413,-	23.08

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2022 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kegiatan Kesepuluh yaitu: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan pagu sebesar Rp. 9,678,295,000,- dan realisasi sebesar Rp. 5,264,372,480,- dengan capaian 54.39%.
- 2) Sasaran Kegiatan Kesembilan yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal dengan pagu sebesar Rp. 23,470,695,000,- dan realisasi sebesar Rp. 5,972,048,284,-, dengan capaian 25.44%.
- 3) Sasaran Kegiatan Keenam yaitu: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 875,477,000,- dan realisasi sebesar Rp. 202,135,363,- dengan capaian 23.09%.
- 4) Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu: Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,367,407,000,- dan realisasi sebesar Rp. 224,533,721,- dengan capaian 16.42%.
- 5) Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu: Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 4,606,359,000,- dan realisasi sebesar Rp. 622,585,412,- dengan capaian 13.52%.
- 6) Sasaran Kegiatan Kesebelas yaitu: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel dengan pagu sebesar Rp. 312,952,000,- dan realisasi sebesar Rp. 39,662,000,- dengan capaian 12.67%.
- 7) Sasaran Kegiatan Keempat yaitu: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di



Bandung dengan pagu sebesar Rp. 3,956,738,500,- dan realisasi sebesar Rp. 449,355,100,- dengan capaian 11.36%.

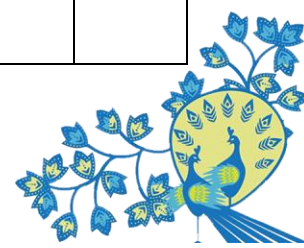
- 8) Sasaran Kegiatan Kedua yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 40,385,000,- dan realisasi sebesar Rp. 3,000,000,- dengan capaian 7.43%.
- 9) Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 260,122,500,- dan realisasi sebesar Rp. 9,280,000,-, dengan capaian 3.57%.
- 10) Sasaran Kegiatan Kelima yaitu: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 10,938,724,000,- dan realisasi sebesar Rp. 389,976,378,- dengan capaian 3.57%.
- 11) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,854,663,000,- dan realisasi sebesar Rp. 46,451,439,-, dengan capaian 2.50%.

Sedangkan jika dilihat penyerapan anggaran berdasarkan *perspective balance score card* maka secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

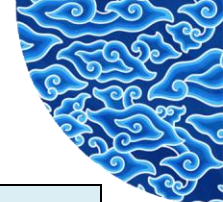
- 1) *Learning and Growth Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.068.301.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.898.668.176,- dengan capaian 31.26%.
- 2) *Internal Process Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.138.346.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1.266.000.562,- dengan capaian 7.39%.
- 3) *Stakeholders Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.155.170.500,- dan realisasi sebesar Rp. 58.731.439,- dengan capaian 2.73%.

**TABEL 3.42
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,854,663,000,-	46,451,439,-	2.50	2.155.170.500,-	58.731.439,-	2.73
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di	40,385,000,-	3,000,000,-	7.43			



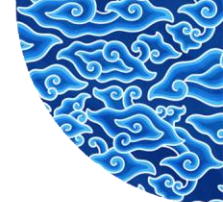
**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TRIWULAN I TAHUN 2022**



Perspective	Sasaran Kegiatan		Sasaran Kegiatan			Perspective		
			Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
		wilayah kerja BBPOM di Bandung						
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	260,122,500,-	9,280,000,-	3.57			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	3,956,738,500,-	449,355,100,-	11.36	17.138.346.500,-	1.266.000.562,-	7.39
	5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10,938,724,000,-	389,976,378,-	3.57			
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	875,477,000,-	202,135,363,-	23.09			
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,367,407,000,-	224,533,721,-	16.42			
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	4,606,359,000,-	622,585,412,-	13.52	38.068.301.000,-	11.898.668.176,-	31.26
	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	23,470,695,000,-	5,972,048,284,-	25.44			
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9,678,295,00,-	5,264,372,480,-	54.39			
	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	312,952,000,-	39,662,000,-	12.67			
NILAI PENCAPAIAN ANGGARAN			57.361.818.000,-	13.237.511.413,-	23.08	57.361.818.000,-	13.237.511.413,-	23.08

Pada triwulan I, RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 7.055.499.000,-, maka deviasi sebesar -87.62 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :





TABEL 3.43
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD
TRIWULAN I TAHUN 2022

BULAN	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori
JANUARI	1.78	4.18	-134.79	BAIK
FEBRUARI	6.63	17.50	-163.99	BAIK
MARET	12.30	23.08	-87.62	BAIK

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : HK.02.02.2.21.04.21.11 tentang Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

- a. Triwulan I, sebesar minimal 15 persen;
- b. Triwulan II, sebesar minimal 40 persen;
- c. Triwulan III, sebesar minimal 60 persen; dan
- d. Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

TABEL 3.44
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I TAHUN 2022

Target Realisasi Anggaran TW I	Realisasi Anggaran Triwulan I	Capaian
15,00%	23,08%	153,87%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$



Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien

Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

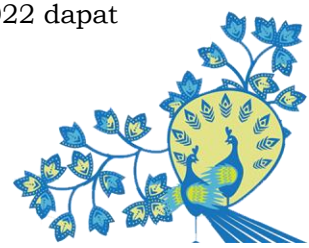
Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

$$TE$$

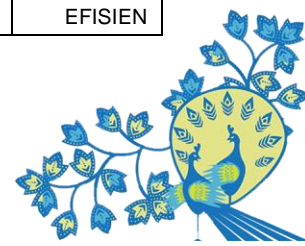
Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

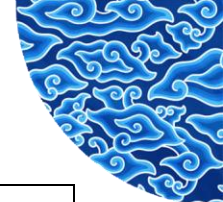
Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada triwulan I tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL 3.45
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama	Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI	
	Capaian (%)	Capaian (%)				
a	B	c	d=b/c	e=d-1	f	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.96	0.00			
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	98.29	3,24	30.34	29.34	EFISIEN
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80.91	0.00			
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	119.04	3.24	36.76	35.76	EFISIEN
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	101.31	48.22	2.10	1.10	EFISIEN
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu		7.43			
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		0.00			
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		30.21			
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung		0.00			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	103.09	17.98	5.73	4.73	EFISIEN
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	109.77	2.22	49.42	48.42	EFISIEN
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	74.20	13.81	5.37	4.37	EFISIEN
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	92.98	15.17	6.13	5.13	EFISIEN
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	104.92	12.33	8.51	7.51	EFISIEN
15	Indeks Pelayanan Publik		0.00			
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55.57	7.01	7.93	6.93	EFISIEN
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	98.06	2.13	45.93	44.93	EFISIEN
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	79.00	9.93	7.96	6.96	EFISIEN
19	Jumlah desa pangan aman	75.00	4.08	18.36	17.36	EFISIEN





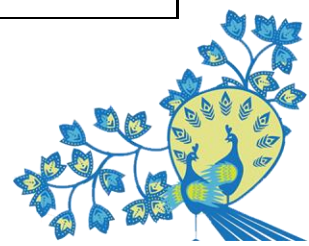
Indikator Kinerja Utama	Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI	
	Capaian (%)	Capaian (%)				
a	B	c	d=b/c	e=d-1	f	
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	62.50	18.00	3.47	2.47	EFISIEN
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	170.90	22.31	7.66	6.66	EFISIEN
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	209.10	25.65	8.15	7.15	EFISIEN
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75.82	16.42	4.62	3.62	EFISIEN
24	Indeks RB UPT		13.75			
25	Nilai AKIP UPT		0.00			
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT		25.44			
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		54.90			
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	80.89	41.65	1.94	0.94	EFISIEN
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	214.60	12.67	16.93	15.93	EFISIEN
TOTAL		72.31	23.08	3.13	2.13	EFISIEN

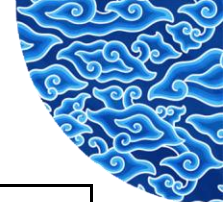
Pada triwulan I tahun 2022, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori **Efisien (2.13)**.

Sedangkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan I tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.46
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TRIWULAN I TAHUN 2022**

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume Capaian (%)	Anggaran Capaian (%)	IE	TE	KATEGORI
a	b	c	d	e=c/d	f=e-1	g
1	3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	21,43	21,53	1,00	0,00	EFISIEN
2	3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	19,42	11,74	1,66	0,66	EFISIEN
3	3165.BDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	17,00	0,00			





No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume Capaian (%)	Anggaran Capaian (%)	IE	TE	KATEGORI
a	b	c	d	e=c/d	f=e-1	g
4	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	25,00	4,36	5,74	4,74	EFISIEN
5	3165.BMB.001 - Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	7,41	0,00			
6	3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,00	0,00			
7	3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0,00	0,00			
8	3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	98,79	1,01	0,01	EFISIEN
9	3165.EBA.962 - Layanan Umum	25,00	22,99	1,09	0,09	EFISIEN
10	3165.PDD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	10,62	10,38	1,02	0,02	EFISIEN
11	3165.QCD.U02 -Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	30,00	12,74	2,36	1,36	EFISIEN
12	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	15,80	9,93	1,59	0,59	EFISIEN
13	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	18,75	4,08	4,59	3,59	EFISIEN
14	3165.QDB.003 -Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	12,50	2,78	4,50	3,50	EFISIEN
15	3165.QDC.001 - KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	2,86	1,77	1,61	0,61	EFISIEN
16	3165.QIA.001 -Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	18,64	5,98	3,12	2,12	EFISIEN
17	3165.QIA.005 -Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	14,14	8,48	1,67	0,67	EFISIEN
18	3165.QIA.008 - Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	54,84	12,89	4,26	3,26	EFISIEN
19	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	16,75	13,89	1,21	0,21	EFISIEN
20	3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	14,89	9,16	1,63	0,63	EFISIEN
21	3165.RAB.001- Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	2,57	2,51	1,03	0,03	EFISIEN
22	6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	25,00	22,23	1,12	0,12	EFISIEN
TOTAL		20,57	12,56	1,64	0,64	EFISIEN

Pada triwulan I tahun 2022, BBPOM di Bandung melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (TE=4,74). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada triwulan I terlaksana secara efisien (TE=0.64).



Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.



LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



TRIWULAN I
TAHUN 2022



BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN



4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2022 mengukur pencapaian kinerja triwulan I tahun 2022 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 merupakan tahun ketiga Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2022, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria baik, tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria cukup, dan dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, serta empat (4) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 98,10% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua dan ketiga belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun, sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan serta meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 90,09% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 78,64% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan belum berhasilnya upaya Balai Besar POM di



Bandung dalam meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan.

- ☪ Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 190,00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan, namun perlu dilakukan reviu terhadap target yang telah ditetapkan.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 75,82% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan belum berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan dan kesembilan belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun sehingga belum dapat menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal serta mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal.
 - ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 80,89% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan belum berhasilnya upaya Balai Besar POM di Bandung menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
 - ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 214,61% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel, namun perlu dilakukan reviu terhadap target yang telah ditetapkan.
3. Pada triwulan I tahun 2022, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) didapatkan hasil sebesar Efisiensi (TE = 2,13).



4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi new normal serta sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2022 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.




LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR POM DI BANDUNG



TRIWULAN I TAHUN 2022



LAMPIRAN

1. **REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024**
 2. **RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2022**
 3. **PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2022**
 4. **RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2022**
 5. **PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2022**
 6. **TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2022**
 7. **TINGKAT EFISIENSI RINCIAN OUTPUT BALAI BESAR POM DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2022**
- 

**LAMPIRAN 1
REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE									
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	97	97,5	98	98,5
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	80	82	84	86
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94	95	95,5	96	94
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78	70	72	74	76
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat						70	72	74	76
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83	71	74	77	80
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89	91,1	92,3	93,4	94,6
8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	77,83	80,22	82,62	85,01
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92	89,50	90,50	91,00	92,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	96	97	98	99
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85	64	71	78	85
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	88	91	94	97
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70	57	61	66	70
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82	74	76	78	80



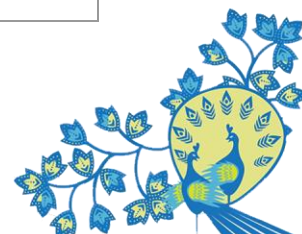
**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16. Persentase UMKM yang memenuhi standar						-	77	79	81
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83	92	93.8	95.7	97.6
18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104	42	76	112	150
19. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47	19	28	37	47
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	8	13	18	23	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94	100	100	100	100
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90	100	100	100	100
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung									
23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90	65	67	69	71
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE									
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal									
24. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95	82.8	83.8	84.8	85.8
25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92	83	85.5	88	90.5
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal									
26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85	79	80	81	82
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan									
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90	79	84	89	94
28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3	2	2.25	2.5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel									
29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97	95.1	95.3	95.6	95.9
30. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (95%)	-	-	-



**LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97%
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71%
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61%
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,45
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	77%
		17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19. Jumlah desa pangan aman	28
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
		21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		23. Presentase keberhasilan penindakan	67%



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	kejahatan di bidang Obat dan Makanan	
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84%
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.3



**LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5%
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3
		8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.22
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90.50
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97%
		11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71%
		12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91%
		13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61%
		14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76%
		15. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	4,45
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	77%
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8
		18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		19. Jumlah desa pangan aman	28
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	21. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	23. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67%
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	24. Indeks RB BBPOM di Bandung	83.8
		25. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	85.5
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	80
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84%
		28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	2.25
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	95.3



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

**LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	727.971.420, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	436.247.500, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	375.015.580, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	234.902.500, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	80.526.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												74	45.712.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92.3	204.200.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												80.22	30.720.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90.50	25.202.500, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	267.880.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	390.262.000, 00



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	988.636.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	745.414.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	1.236.470.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.45	25.202.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.33	6.67	30	30	36.67	36.67	36.67	36.67	63.33	70	93.33	77	624.875.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	8.549.580.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	20	20	20	20	23	38	44	70	82	76	977.871.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		20	25	55	65	65	75	75	85	95	100	28	1.190.726.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	618.228.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	204.009.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	6	16	28	32	36	41	46	51	58	61	64	67	1.455.307.000,00
23.	Indeks RB UPT												83.8	4.322.083.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												85.5	340.780.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												80	25.028.978.000,00



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											84		9.624.790.000, 00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	398.285.000, 00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.9	15.8	23.7	31.6	39.5	47.4	55.3	63.2	71.1	79	86.9	95.3	315.274.000, 00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		20	20	25	40	40	60	70	90	90	90	13	359.627.000, 00
Total													59.824.775.000, 00	



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

**LAMPIRAN 5
PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahun 2022	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I	Capaian Terhadap Target Tahun 2022		
				TW I Tahun 2022						
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
Stakeholder Perspective										
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.50%	97.50%	251	283	88.69%	90.97%	90.97%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00%	82.00%	108	134	80.60%	98.29%	98.29%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.50%	95.50%	51	66	77.27%	80.91%	80.91%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00%	72.00%	12	14	85.71%	119.05%	119.05%
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72.00%	72.00%	62	85	72.94%	101.31%	101.31%
NPS SK 1							98.10%	98.10%		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	74.00	-	-	-	-	-	-
NPS SK 2							-	-		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.30	-	-	-	-	-	-
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80.22	-	-	-	-	-	-
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.50	-	-	-	-	-	-
NPS SK 3							-	-		
Capaian Perspective stakeholder							32.70	32.70		
Internal Process Perspective										
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	10	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.00%	97.00%	-	-	100%	103.09%	103.09%



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2022	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I	Capaian Terhadap Target Tahun 2022
					TW I Tahun 2022				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71.00%	71.00%	-	-	77.94%	109.77%	109.77%
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91.00%	91.00%	-	-	67.52%	74.20%	74.20%
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00%	61.00%	38	67	56.72%	92.98%	92.98%
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	76.00%	181	227	79.74%	104.92%	104.92%
	15	Indeks Pelayanan Publik	4.45	4.45	-	-	-	-	-
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar	77.00%	Progres s 30%	-	-	Progress 16.67%	55.56%	16.67%
NPS SK 4							90.09%	90.09%	
5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.80	93.8	-	-	91.98	98.06%	98.06%
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76	Progres s 20%	-	-	Progress 15.80%	79%	15.80%
	19	Jumlah desa pangan aman	28	Progres s 25%	-	-	Progress 18.75%	75%	18.75%
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13	Progres s 20%	-	-	Progress 12.5%	62.5%	12.50%
NPS SK 5							78.64%	78.64%	
6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00 %	10.00%	-	-	17.09%	170.90%	17.09%
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00 %	10.00%	-	-	20.91%	209.10%	20.91%
NPS SK 6							190.00%	190.00%	
7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67.00%	28.00%	-	-	21.23%	75.82%	353.83
NPS SK 7							75.82%	75.82%	
Capaian Internal Process Perspective							108.64	108.64	
Learning & Growth Perspective									
8 Terwujudnya tatakelola	24	Indeks RB UPT	83.80	-	-	-	-	-	-



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2022	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I	Capaian Terhadap Target Tahun 2022
					TW I Tahun 2022				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi		
pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	85.50	-	-	-	-	-	
NPS SK 8								-	-
9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80.00	-	-	-	-	-	
NPS SK 9								-	-
10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84.00%	-	-	-	-	-	
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	-	-	1.82	80.89%	80.89%
NPS SK 10								80.89%	80.89%
11 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.30	23.70	-	-	50.86	214.61%	53.37%
NPS SK 11								214.61%	214.61%
Capaian Learning & Growth Perspective								73.87	73.87
NPS TOTAL									



LAMPIRAN 6
TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022

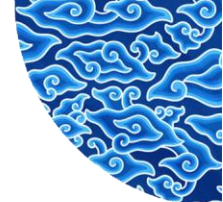
Indikator Kinerja Utama		Volume				Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	KATEGORI
		Target 2022	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Pagu	Realisasi TW I	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.5	97.5	88.69	90.96	727,971,420	0	0.00			
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82	82	80.6	98.29	436,247,500	14,125,361	3.24	30.34	29.34	EFISIEN
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5	95.5	77.27	80.91	375,015,580	0	0.00			
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	85.71	119.04	234,902,500	7,605,964	3.24	36.76	35.76	EFISIEN
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	72	72	72.94	101.31	80,526,000	38,831,350	48.22	2.10	1.10	EFISIEN
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74				40,385,000	3,000,000	7.43			
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.3				204,200,000	0	0.00			
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80.22				30,720,000	9,280,000	30.21			
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	90.5				25,202,500	0	0.00			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan	97	97	100	103.09	169,479,000	30,470,300	17.98	5.73	4.73	EFISIEN
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	77.94	109.77	367,149,000	8,155,000	2.22	49.42	48.42	EFISIEN



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

Indikator Kinerja Utama	Volume				Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	KATEGORI	
	Target 2022	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)	Pagu	Realisasi TW I	Capaian (%)				
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	91	67.52	74.20	821,017,000	113,349,800	13.81	5.37	4.37	EFISIEN
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	61	56.72	92.98	698,797,000	105,975,000	15.17	6.13	5.13	EFISIEN
14	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	76	76	79.74	104.92	1,128,100,000	139,065,000	12.33	8.51	7.51	EFISIEN
15	Indeks Pelayanan Publik	4.45				25,202,500	0	0.00			
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	30	16.67	55.57	746,994,000	52,340,000	7.01	7.93	6.93	EFISIEN
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.8	93.8	91.98	98.06	8,410,500,000	179,549,600	2.13	45.93	44.93	EFISIEN
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76	Progres s 20	Progress 15.80	79.00	977,871,000	97,082,000	9.93	7.96	6.96	EFISIEN
19	Jumlah desa pangan aman	28	Progres s 25	Progress 18.75	75.00	1,190,726,000	48,629,778	4.08	18.36	17.36	EFISIEN
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13	Progres s 20	Progress 12.50	62.50	359,627,000	64,715,000	18.00	3.47	2.47	EFISIEN
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	10	17.09	170.90	671,468,000	149,810,031	22.31	7.66	6.66	EFISIEN
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	10	20.91	209.10	204,009,000	52,325,332	25.65	8.15	7.15	EFISIEN
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	28	21.23	75.82	1,367,407,000	224,533,721	16.42	4.62	3.62	EFISIEN
24	Indeks RB UPT	83.8				4,526,679,000	622,585,412	13.75			
25	Nilai AKIP UPT	85.8				79,680,000	0	0.00			
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80				23,470,695,000	5,972,048,284	25.44			
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84				9,310,290,000	5,111,107,480	54.90			
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	1.82	80.89	368,005,000	153,265,000	41.65	1.94	0.94	EFISIEN
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.3	23.7	50.86	214.60	312,952,000	39,662,000	12.67	16.93	15.93	EFISIEN



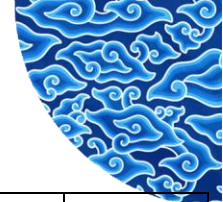


**LAMPIRAN 7
TINGKAT EFISIENSI RINCIAN OUTPUT
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**

No	Program /	Volume				Anggaran			IE	TE	KATEGORI
	Kegiatan /	Satuan	Target 2022	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)			
	RO										
1	3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Laporan	14	3	21.43	445,327,000	95,880,000	21.53	1.00	0.00	EFISIEN
2	3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Keputusan	1910	371	19.42	1,319,067,000	154,800,000	11.74	1.66	0.66	EFISIEN
3	3165.BDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	UMKM	38	Progress 17%	17.00	142,754,000	0	0.00			
4	3165.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Laporan	1	Progress 25%	25.00	1,353,733,000	59,002,400	4.36	5.74	4.74	EFISIEN
5	3165.BMB.001 - Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Layanan	54	4	7.41	204,200,000	0	0.00			
6	3165.CAB.002 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Paket	1	0	0.00	587,743,000	0	0.00			
7	3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Unit	1	0	0.00	1,580,000,000	0	0.00			
8	3165.CAN.001 - Perangkat pengolahan data dan komunikasi	Unit	1	1	100.00	136,415,000	134,765,000	98.79	1.01	0.01	EFISIEN
9	3165.EBA.962 - Layanan Umum	Layanan	1	Progress 25%	25.00	1,780,009,000	409,136,425	22.99	1.09	0.09	EFISIEN
10	3165.PDD.001 - Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Laboratorium	1	Progress 10.62%	10.62	3,000,000,000	311,333,080	10.38	1.02	0.02	EFISIEN
11	3165.QCD.U02 -Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	Perkara	10	3	30.00	1,009,980,000	128,653,721	12.74	2.36	1.36	EFISIEN
12	3165.QDB.001 - Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	76	Progress 15.80%	15.80	977,871,000	97,082,000	9.93	1.59	0.59	EFISIEN
13	3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	Desa	28	Progress 18.75%	18.75	1,190,726,000	48,629,778	4.08	4.59	3.59	EFISIEN
14	3165.QDB.003 -Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Pasar	13	Progress 12.50%	12.50	359,627,000	9,992,000	2.78	4.50	3.50	EFISIEN
15	3165.QDC.001 - KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Orang	24,300	694	2.86	8,549,580,000	151,199,600	1.77	1.61	0.61	EFISIEN
16	3165.QIA.001 -Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sampel	1003	187	18.64	875,159,000	52,325,332	5.98	3.12	2.12	EFISIEN
17	3165.QIA.005 -Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	Sampel	2,659	376	14.14	1,721,215,000	146,007,031	8.48	1.67	0.67	EFISIEN
18	3165.QIA.008 - Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	Sampel	155	85	54.84	80,526,000	10,376,000	12.89	4.26	3.26	EFISIEN
19	3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sarana	400	67	16.75	953,064,000	132,385,300	13.89	1.21	0.21	EFISIEN



**LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2022**



No	Program/ Kegiatan/	Volume				Anggaran			IE	TE	KATEGORI
	RO	Satuan	Target 2022	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)			
	20	3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Sarana	1,525	227	14.89	1,827,264,000	167,363,000			
21	3165.RAB.001- Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Laboratorium	1	Progress 2.57%	2.57	5,134,770,000	128,729,800	2.51	1.03	0.03	EFISIEN
22	6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	Layanan	1	Progress 25%	25.00	26,595,745,000	5,913,024,005	22.23	1.12	0.12	EFISIEN





WBK BBPOM BANDUNG
JUARA!
GOES TO **WBBM** BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Berkeadilan Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

